

TESIS

EVALUASI PROGRAM DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR PARIWISATA KABUPATEN NATUNA (STUDI WISATA PULAU SENUA)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu
Pemerintahan (M.IP)



Oleh :

NAMA : WAN WAHYULIANDRA

NOMOR MAHASISWA : 187321010

BIDANG KAJIAN UTAMA : ILMU PEMERINTAHAN

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU PEMERINTAHAN

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2022

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
 PROGRAM PASCASARJANA
 PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
 LEMBAR PENGESAHAN

Nama : WAN WAHYU SANDRA
 NPM : 187321010
 Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan
 Judul Tesis : EVALUASI PROGRAM DINAS PARIWISATA DAN
 KEBUDAYAAN DALAM MENINGKATKAN
 PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR PARIWISATA
 KABUPATEN NATUNA (STUDI WISATA PULAU SENJUA)

Telah di pertahankan di hadapan Sidang Penguji Tesis Program Pascasarjana,
 Program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau
 Hari : Rabu
 Tanggal : 29 Desember 2021
 Pukul : 10.00 WIB

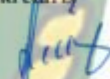
Dan dinyatakan LULUS
 PANITIA PENGUJI PROPOSAL TESIS

Ketua



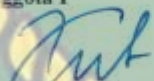
Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si

Sekretaris



Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si

Anggota I



Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., MA

Anggota II



Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

Mengetahui
 Direktur Program Pascasarjana
 Universitas Islam Riau



Prof. Dr. H. Yusri Munaf S.H., M.Hum.

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang berjudul :

**EVALUASI PROGRAM DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN
EKONOMI SEKTOR PARIWISATA KABUPATEN NATUNA
(STUDI WISATA PULAU SENUA)**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Oleh:

Nama : WAN WAHYULIANDRA
NPM : 187321010
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk disidangkan.

Telah diperiksa dan disetujui

Oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan.

Pembimbing I



(Dr. H. Rahyuni Rauf, M.Si)

Tanggal: 14 Desember 2021

Pembimbing II



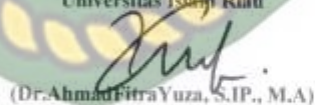
(Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si)

Tanggal: 14-12-2021

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan

Universitas Islam Riau



(Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A)

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
 Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28204 Riau
 Telp. (+62) (761) 674717 – 7047728 Fax. (+62) (761) 674717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
 NOMCR - 648/KPTS/PPs-UIR/2019
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU PEMERINTAHAN

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS - UIR.

2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.

3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mumpuni dan mempunyai kewenangan sebagai pembimbing yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

1. Undang - Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 83 Tahun 2008 Tentang Sistem Perijinan Mutu Pendidikan.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.
 8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau.

MEMUTUSKAN

1. Menunjuk

No	Nama Dosen Pembimbing	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1.	Dr. H. Rahyuni Rauf, M.Si	Lektor Kepala	Pembimbing I
2.	Dr. Khairul Rahman, S. Sos., M. Si	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa

Nama : WAN WAHYULIANDRA
 N.P.M. : 18.732.1010
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Judul Tesis : "PERAN DINAS PARIWISATA DAN BUDAYA DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA PULAU SENCA KABUPATEN NATUNA"

1. Tugas - tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan dalam penulisan tesis.


2. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan.

3. Semua yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.

4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

5. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dicekahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
 PADA TANGGAL 25 Oktober 2019
 Direktur


 Dr. Ir. Saiful Bahri, M. Ed.
 NPK. 32.71.02.199

Disusun : Diampikan Kepala
 Dit. Rektor Universitas Islam Riau
 Dit. Wakil Program Studi Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
 Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wan Wahyuliandra

Npm : 187321010

Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan

Judul Tesis : EVALUASI PROGRAM DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR PARIWISATA KABUPATEN NATUNA (STUDI WISATA PULAU SENUA)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya adalah bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Islam Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau di publikasikan oleh orang lain, kecuali berupa kutipan dengan menyebutkan nama pengarang secara jelas dan dicantumkan di dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dalam dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dari apa yang saya nyatakan di atas (point 1-3), maka saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan nilai ujian Tesis dan/ pecabutan gelar akademik Magister dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.

Pekanbaru,
Yang Membuat Pernyataan,



(Wan Wahyuliandra)

Turnitin Originality Report

Received on: 27-Dec-2021 08:51 WIB
 ID: 179598847
 Word Count: 11294
 Submitted: 1

Similarity Index

15%

Similarity by Source:

Internet Sources:	18%
Publications:	8%
Student Papers:	4%

EVALUASI PROGRAM DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR PARIWISATA KABUPATEN NATUNA (STUDI WISATA PULAU SENUA) By Wan Wahyuulandra

4% match (Internet from 06-May-2021)
<https://text-id.123dok.com/document/wwy45g1z-paran-dinas-pariwisata-dalam-meningkatkan-pertumbuhan-ekonomi-sektor-pariwisata-di-kabupaten-natuna-tahun-2015-stud-wis-pulau-senua-dinas-pariwisata-kabupaten-natuna-1.html>

2% match (Internet from 28-May-2020)

https://www.scribd.com/document/490701720/12_201779804.pdf

2% match (Internet from 22-Nov-2020)

<https://ejournal.upi.ac.id/5593/2/Naskah%20Jurnal%20nasional%201%20meneliti%20dan%20menyempurnakan%20ilmu%20dan%20melayani%20kepentingan%20masyarakat.pdf>

2% match (Internet from 09-Nov-2021)

<https://displayed.in/67512826-Daya-tarik-wisata-dalam-di-pulau-senua-natuna-kecamatan-punguran-timur-kabupaten-natuna.html>

1% match (Internet from 30-Nov-2020)

<https://prosidium.unigat.ac.id/riset/embundle/1234567890565/PROSIDIUNC%20SEMESTER%20NASIONAL%20ADMINISTRASISIPROSIDIUNC%2009%202020>

2% match (Internet from 17-Nov-2021)

<https://www.scribd.com/document/691156128664.pdf>

2% match (Internet from 12-Nov-2021)

<https://www.scribd.com/document/691156128664.pdf>

1% match (Internet from 26-Apr-2021)

<https://id.scribd.com/document/691156128664.pdf>

2% match (Internet from 26-Dec-2014)

<https://www.scribd.com/document/691156128664.pdf>

2% match ()

<https://www.scribd.com/document/691156128664.pdf>

2% match (student papers from 28-Sep-2021)

Submitted to Universitas Nasional on 2021-09-28

2% match (Internet from 08-Nov-2018)

<https://www.scribd.com/document/691156128664.pdf>

2% match (student papers from 09-Sep-2016)

Submitted to Universitas Islam Riau on 2016-09-09

2% match (student papers from 15-May-2019)

Submitted to Universitas Islam Riau on 2019-05-15

EVALUASI PROGRAM DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR PARIWISATA KABUPATEN NATUNA (STUDI WISATA PULAU SENUA) Oleh : WAN WAHYUULANDORA (187321010) TESIS Untuk memenuhi salah satu syarat ujian komprehensif Guna Mendapatkan gelar Magister Ilmu Pemerintahan PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU PEKANBARU 2021 ABSTRAK Kabupaten Natuna merupakan wilayah kepulauan yang dianugerahi kekayaan alam yang indah. Keanekaragaman hayati, kekayaan alam dan objek wisata yang ada terbentang hingga sudut-sudut wilayah Kabupaten Natuna. Akan tetapi, objek wisata di Kabupaten Natuna sejauh ini belum dikembangkan secara optimal. Hal ini tentu saja permasalahan tersendiri mengingat faktor pariwisata merupakan salah satu aset untuk meningkatkan PAD. Penelitian ini sejatinya bertujuan untuk meneliti lebih jauh tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna yang merupakan ujung tombak pengembangan pariwisata di daerah Kabupaten Natuna, khususnya pada pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata beserta tantangannya. Dalam proses penulisannya, tesis ini menggunakan metode kualitatif sebagai metode pengumpulan data dan didukung dengan penggunaan data sekunder, proses observasi, wawancara serta dokumentasi di dalamnya. Dari hasil penelitian, program yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata belum begitu maksimal, dapat dilihat dari program-program yang di adakan oleh Dinas tersebut. Kendati demikian, Pemerintah juga seharusnya lebih memperhatikan permasalahan sarana dan prasarana yang telah rusak dan berkarat serta tidak dapat dioperasikan, di akibatkan oleh hantaman obak maupun disebabkan oleh faktor kurangnya perawatan secara rutin. Karena hal tersebut merupakan fasilitas yang harus di utamakan untuk para wisatawan yang ingin berkunjung ke wisata Pulau Senua. Kata Kunci : Evaluasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pariwisata BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang [Prospek Kepulauan Riau](#)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya kecil ini, untuk cahaya hidup, yang senantiasa ada saat suka maupun duka, selalu setia mendampingi, saatku lemah tak berdaya (Ayah dan Ibu Tercinta) ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu memanjatkan do'a untuk putra tercinta dalam setiap sujudnya hingga sampai selesai menyelesaikan perkuliahan. Dan juga tidak lupa kepada adik-adik saya, dan anak saya tersayang yang juga selalu mendo'akan. Serta teman-teman terdekat yang selalu menolong ataupun mensupport kepada saya sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Wan Wahyu Liandra
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Tempat dan Tanggal Lahir : Bengkalis, 20 November 1994
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta
 Nama Orang Tua
 -Ayah : Wan Siswandi
 -Ibu : Yuliana
 Riwayat Hidup Pendidikan
 SD : SDN 001 Ranai Kab. Natuna
 SMP : SMPN 001 Ranai Kab. Natuna
 SMA : SMAN 001 Ranai Kab. Natuna
 S1 : UNIVERSITAS
 MUHAMMADIYAH
 YOGYAKARTA. Prodi Ilmu
 Pemerintahan
 Alamat Terakhir : Jln. Pramuka, Kelurahan Batu Hitam
 Kecamatan Bunguran Timur. Kab.
 Natuna
 Nomor Telepon : 081267877336
 Hobby : Futsal dan Renang
 E-Mail : wahyuliand@gmail.com

**EVALUASI PROGRAM DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN
EKONOMI SEKTOR PARIWISATA KABUPATEN NATUNA
(STUDI WISATA PULAU SENUA)**

ABSTRAK

Kabupaten Natuna merupakan wilayah kepulauan yang dianugrahi kekayaan alam yang indah. Keanekaragaman hayati, kekayaan alam dan objek wisata yang ada terbentang hingga sudut-sudut wilayah Kabupaten Natuna. Akan tetapi, objek wisata di Kabupaten Natuna sejatinya belum dikembangkan secara optimal. Hal ini tentu saja permasalahan tersendiri mengingat faktor pariwisata merupakan salah satu aset untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini sejatinya bertujuan untuk menelisik lebih jauh tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna yang merupakan ujung tombak pengembangan pariwisata di daerah Kabupaten Natuna, khususnya pada pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata beserta tantangannya. Dalam proses penulisannya, tesis ini menggunakan metode kualitatif sebagai metode pengumpulan data dan didukung dengan penggunaan data sekunder, proses observasi, wawancara serta dokumentasi di dalamnya. Dari hasil penelitian, program yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata belum begitu maksimal, dapat dilihat dari program-program yang diadakan oleh Dinas itu sendiri. Kendati demikian, Pemerintah juga seharusnya lebih memperhatikan permasalahan sarana dan prasarana yang telah rusak dan berkarat serta tidak dapat dioperasikan, diakibatkan oleh hantaman ombak maupun diakibatkan oleh faktor kurangnya perawatan secara rutin. Karena hal tersebut merupakan fasilitas yang harus diutamakan untuk para wisatawan yang ingin berkunjung ke wisata Pulau Senoa.

Kata Kunci : Evaluasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pariwisata

**EVALUATION OF TOURISM AND CULTURE DEPARTMENT PROGRAM
IN INCREASING ECONOMIC GROWTH OF THE TOURISM SECTOR
NATUNA DISTRICT**

(SENUA ISLAND TOURISM STUDY)

ABSTRACT

Natuna Regency is an archipelago that is blessed with beautiful natural resources. Biodiversity, The natural wealth and tourist objects that exist stretch to the corners of the Natuna Regency area. However, tourism objects in Natuna Regency have not actually been developed optimally. This is of course a separate problem considering the tourism factor is one of the assets to increase Regional Original Income. This research actually aims to further investigate the duties of the Natuna Regency Tourism and Culture Office, which is the spearhead of tourism development in the Natuna Regency area, especially in the economic growth of the tourism sector and its challenges. In the process of writing, This thesis uses qualitative methods as data collection methods and is supported by the use of secondary data, the process of observation, interviews and documentation in it. From the results of the research, the program carried out by the Department of Tourism and Culture of Natuna Regency in increasing economic growth in the tourism sector has not been so maximal, it can be seen from the programs held by the Department itself. However, the Government should also pay more attention to the problems of facilities and infrastructure that have been damaged and rusty and cannot be operated, caused by the impact of the obak or caused by the lack of routine maintenance. Because this is a facility that must be prioritized for tourists who want to visit Senoa Island tourism.

Keywords: Evaluation, Economic Growth, Tourism

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk Tesis dapat penulis selesaikan. "EVALUASI PROGRAM DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR PARIWISATA KABUPATEN NATUNA (STUDI WISATA PULAU SENUA)." Ini penulis tulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat memanfaatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar Magister.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembaran bab per bab tesis ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh program Pascasarjana. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembaran tertentu dari tesis ini mungkin di temukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis Menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian tesis ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan ini penulis mengucapkan salu dan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL. Yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum. Yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
3. Bapak Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A. Selaku ketua Program Studi dan jajaran Dosen pada jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah memfasilitasi serta menularkan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulisan dalam menyusun tesis ini.

4. Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf M.Si., Selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
5. Bapak Dr. Khairu lRahman, S,Sos., M.Si., Selakudosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menimba ilmu di Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
7. Karyawan, Pegawaidan Tata Usaha yang selalu mengarahkan penulis dalam melengkapi kelengkapan prosedur melakukan penelitian.
8. Orang tua, Selaku yang telah memberikan semangat dan motivasi penulis agar penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
9. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2018 terutama jurusan Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan, serta rekan-rekan yang memberikan dukungan penuh kepada saya yang tidak dapat saya cantumkan disini.

Penulis bermohon kepada yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dan karunia yang setimpal, Amin.

Akhirnya Penulis berharap semoga usulan penelitian ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap pembacanya.

Pekanbaru,.....

Penulis,

(WanWahyuliandra)

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan Pembimbing	ii
Lembar Pengesahan Tim Penguji.....	iii
Surat Pernyataan.....	iv
Halaman Persembahan	v
Riwayat Hidup Penulis.....	vi
Abstrak	vii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi.....	xi
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar.....	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Batasan Penelitian	15
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
a. Tujuan Penelitian	15
b. Manfaat Penelitian	16
BAB II: KAJIAN KEPUSTAKAAN	17
2.1 Konsep Teori	17
A. Ilmu Pemerintahan	17
B. Pemerintahan.....	20
C. Pemerintah Daerah	22
D. Pertumbuhan Ekonomi.....	26
E. Pariwisata	29
F. Evaluasi	32
2.2 Ulasan Karya	39
2.3 Kerangka Pemikiran	41
2.4 Konsep Operasional.....	43

2.5 Operasional Variabel	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
3.1 Jenis Penelitian.....	46
3.2 Informan Penelitian.....	46
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	48
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	49
3.5 Teknik Analisis Data.....	50
3.6 Lokasi Penelitian.....	53
3.7 Jadwal Penelitian.....	54
BAB IV PEMBAHASAN.....	55
4.1 GAMBARAN LOKASI PENELITIAN	55
4.1.1 Kabupaten Natuna	55
A. Geografi.....	55
B. Topografi.....	56
C. Demografi	58
4.1.2 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna	59
a. Visi dan Misi Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna.....	59
b. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna ..	61
c. Kondisi Sumber Daya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	65
4.2 PEMBAHASAN.....	65
4.2.1 Analisis Program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kab.....	65
a. Tujuan Program	71
b. Problem.....	73
c. Deskripsi dan Standarisasi	80
d. Tingkat Perubahan	82
e. Sebab Akibat.....	88
4.2.2 Faktor Penghambat	90
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	99
5.1 Kesimpulan.....	99
5.2 Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Potensi Objek Wisata Pada Setiap Kecamatan di Kab. Natuna.....	2
Tabel 1.2 Potensi Wisata Budaya, Permainan Rakyat, dan Kerajinan di Kab...	3
Tabel 1.3 Jumlah Kunjungan Wisatawan di Wisata Pulau Senoa	13
Tabel 2.1 Ulasan Karya.....	40
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian.....	54
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Natuna	58



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pulau Wisata Senoa di Lihat Dari Desa Sepempang.....	9
Gambar 1.2 Wisata Pulau Senoa Kabupaten Natuna	11
Gambar 4.1 Peta Topografi Kabupaten Natuna	57
Gambar 4.2 Armada Wisata Menuju ke Wisata Pulau Senoa.....	79
Gambar 4.3 Kondisi Pelabuhan Apung di Wisata Pulau Senoa.....	93
Gambar 4.4 Hasil Olahan Kuliner Masyarakat Natuna	96



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Kepulauan Riau menetapkan Kabupaten Natuna sebagai Koridor Pembangunan Pariwisata Daerah yaitu kawasan geografis yang berada dalam suatu wilayah administratif yang didalamnya terdapat potensi ekowisata dan keindahan bahari yang menjadi aktraksi wisata unggulan. Pengembangan pasar pariwisata dilakukan dengan penciptaan destinasi pariwisata unggulan dan mengembangkan promosi tematik tertentu ekowisata dan destinasi wisata bahari.¹

Terletak di kawasan perbatasan, Kabupaten Natuna memiliki pemandangan yang indah dengan panorama alam yang masih terjaga keasriannya dan memiliki banyak potensi dalam sektor Pariwisata. Namun sebagian besar objek wisata di Kabupaten Natuna belum dikembangkan secara optimal.

Pemerintah Kabupaten Natuna sudah berupaya keras untuk menata serta mengelola aspek-aspek yang berkaitan dengan sumberdaya yang mempunyai potensi di sektor pariwisata terutama keindahan bahari dan keindahan alam, hal ini adalah modal dasar yang logis untuk diandalkan dan dikembangkan menjadi pusat pariwisata. Adapun potensi wisata yang ada di Kabupaten Natuna, yaitu:

¹ website Dinas Pariwisata (<http://www.disparbud.natunakab.go.id>) diakses pada 3 Februari 2021, pukul 14:05

Tabel 1.1

Potensi Objek Wisata Ditinjau Pada Setiap Kecamatan di Kabupaten Natuna

No	Lokasi Kecamatan	Objek Wisata
1	Bunguran timur	Pantai Kencana, Bukit Senubing, Alif Stone Park, Pulau Senoa, Mangrove Pering, Mangrove Sebala
2	Bunguran Timur Laut	Pantai Teluk Selahang (Pantai tanjung), Wisata Mangrove Semitan
3	Bunguran Selatan	Batu Kasah, Pantai Teluk Depeh, Batu Madu
4	Serasan	Pantai Sisi
5	Bunguran Tengah	Hutan Wisata

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna (Tahun 2020)

Potensi-potensi inilah yang harus secara terus menerus ditingkatkan melalui peran dari Pemerintah yang diemban oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna. Oleh karena itu perlu adanya upaya nyata Pemerintah dalam meningkatkan daya tarik objek wisata bahari secara optimal yaitu melalui penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.

Visi pembangunan kepariwisataan nasional adalah terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan tujuan itu Kabupaten Natuna juga memiliki potensi untuk pengembangan potensi keindahan alam sebagai aset yang tak ternilai. Potensi alam yang didukung oleh keunikan seni budaya yang dimiliki dapat menjadi alternatif untuk dikembangkan menjadi sektor yang dapat meningkatkan ekonomi daerah dan pendapatan

masyarakat. Adapun Potensi Wisata Budaya yang dimiliki Kabupaten Natuna dapat dilihat pada table 1.2 dibawah ini:

Tabel 1.2
Potensi Wisata Budaya, Permainan Rakyat, Dan Kerajinan Di
Kabupaten Natuna

No	Potensi Wisata	Objek Wisata
1	Kesenian Tradisional	Tari Zapin, Mendu, Gambus, Bertingkah Beduk, Bertingkah Gendang, Awan Mendung, Berzanji, Silat, Ratif Saman, Tumbuk Emping, Hadrah
2	Permainan Rakyat	Adu Gasing, Loncat Batu, Lu lu cina, Gali Kayu, Ring Kap, Panjat Pinang, Lomba Perahu Kolek
3	Kerajinan	Anyaman Tapis, Tikar, Nyiru

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna (Tahun 2020)

Dari tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa Kabupaten Natuna mempunyai kekayaan budaya tradisional yang sangat berpotensi apabila dikelola secara maksimal dan dapat menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara sehingga mampu menghasilkan dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup besar. Oleh karena itu berbagai upaya telah dilakukan dalam memaksimalkan potensi kekayaan alam yang terdapat di Kabupaten Natuna. Melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berbagai upaya yang dilakukan melalui pembenahan, penataan objek wisata, penyediaan transportasi serta promosi-promosi dilakukan guna meningkatkan kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 10 Tahun 2009 Pasal 4 tentang Kepariwisataan dapat diketahui bahwa “pariwisata bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkokoh jati diri dan kesatuan bangsa, mempererat persahabatan antara bangsa.”²

Berdasarkan Undang-Undang Kepariwisataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan pengembangan pariwisata bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, mampu bersaing di era perubahan serta mampu memelihara nilai-nilai kelestarian budaya lokal atau daerah. Saat ini berbagai potensi wisata di daerah-daerah terus dikembangkan dan dipromosikan mengingat di era otonomi daerah sekarang yang menekankan perlunya kebijakan masing-masing daerah berdasarkan nilai-nilai kearifan lokalnya. Selain itu juga dalam pengembangan pariwisata jika dilakukan lebih efektif dan efisien maka tentunya hal tersebut untuk mencapai sasarannya. Sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Peran pemerintah dalam pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah (DPUD) di kawasan objek wisata tertuang dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 13 Tahun 2011 yaitu pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pembangunan daya tarik wisata, pembangunan sarana dan prasarana umum,

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Pasal 4 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

fasilitas umum dan fasilitasi pariwisata, pembangunan aksesibilitas dan atau transportasi dan pemberdayaan masyarakat.³

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna adalah unsur pelaksana Pemerintahan dibidang kepariwisataan dan kebudayaan. Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada bupati.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Natuna berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016, terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretaris
 - a. Subbag Umum dan Kepegawaian
 - b. Subbag Keuangan dan Perencanaan
- 3) Bidang DestinasiPariwisata
 - a. Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Daya Tarik Wisata
 - b. Seksi Tata Kelola Destinasi dan Pembeerdayaan Mayarakat
- 4) Bidang pemasaran Pariwisata
 - a. Seksi Promosi Pariwisata
 - b. Seksi Kerjasama Kelembagaan dan Industri Pariwisata
- 5) Bidang Kebudayaan
 - a. Seksi Kesenian, Adat dan Tradisi
 - b. Seksi Sejarah dan Cagar Budaya
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam Melaksanakan fungsi pengawasan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:

³Peraturan Bupati Natuna Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

1. Tugas Pokok

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagai kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang kepariwisataan dan kebudayaan sesuai dengan lingkup tugasnya.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai fungsi, yaitu:

- a. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi keuangan, umum dan kepegawaian.
- b. Penyusunan program dibidang Pariwisata dan Budaya.
- c. Perumusan Kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pembinaan teknis dibidang Pariwisata dan Budaya.
- d. Perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pembinaan teknis dibidang Destinasi Pariwisata dan Bidang Kebudayaan.
- e. Penyelenggaraan dan pengendalian dibidang Pariwisata dan Kebudayaan.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang di serahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam menjalankan program kegiatan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna dan untuk terselenggaranya berbagai aktifitas serta kegiatan maka perlu diperjelas dengan adanya pembagian tugas pokok dan

fungsi dari setiap bidang yang ada di Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna. Yaitu:

- 1) Kepala Dinas bertugas sebagai Pemimpin pelaksanaan pekerjaan dan tanggung jawab SKPD sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna.
- 2) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, perlengkapan, urusan keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, penyusunan perencanaan, mengumpulkan, mensistematiskan dan mengumpulkan program serta evaluasi.
- 3) Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengembangkan objek dan daya tarik wisata, sarana, dan prasarana objek dan daya tarik wisata yang meliputi wisata bahari, wisata alam, wisata buatan, wisata minat khusus, wisata budaya, dan wisata lainnya.
- 4) Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam merencanakan, menyusun dan mengevaluasi perumusan kebijakan pemasaran pariwisata, menciptakan citra pariwisata, koordinasi dengan lembaga pendukung pengembangan kepariwisataan, promosi yang efektif dan efisien serta tepat sasaran sesuai simentasi pasar, serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia disektor pariwisata sehingga pariwisata memiliki daya saing dan meningkatkan perekonomian masyarakat dunia usaha dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

5) Bidang Kebudayaan, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitas, koordinasi, serta pembinaan dan pengembangan kebudayaan.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna telah Menyusun rencana Program dan Kegiatan sebagai upaya untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Yaitu:

1. Program Kegiatan Peningkatan Sarana Penunjang Pariwisata.
2. Program Kegiatan Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan.
3. Program Kegiatan Festival Wisata Bahari.
4. Pengembangan Objek Pariwisata unggulan.
5. Peningkatan peranserta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata.
6. Pelaksanaan promosi pariwisata Nusantara didalam dan luar Negeri.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna mempunyai visi dan misi sampai target tahun 2020 adalah "Manjadikan Kabupaten Natuna sebagai pintu gerbang pariwisata di ujung utara Indonesia yang dapat mengangkat harkat dan martabat serta meningkatkan kesejahteraan sosial budaya dan ekonomi masyarakat dalam lingkungan yang berkelanjutan Tahun 2020".

Sejalan dengan visi tersebut, salah satu objek wisata alam yang berada di Kabupaten Natuna YaituWisata Pulau Senoa.Yang sangat berpotensi untuk bisa menjadi salah satu pariwisata bahari yang dapat dikembangkan, guna mengangkat harkat, martabat serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.Pulau wisata

Senoa ini merupakan pulau yang letaknya tidak jauh dari pusat kota Ranai Ibukota Kabupaten Natuna. Dapat dilihat pada gambar 1.1 di bawah ini:

Gambar 1.1
Pulau Wisata Senoa di Lihat Dari Desa Sepempang



Sumber:kumparan.com

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa lokasi Wisata Pulau Senoa tersebut tidak begitu jauh dengan Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur, dan hanya memakan waktu sekitar 20 (Dua Puluh) menit untuk sampai ke lokasi Pulau Wisata Senoa tersebut dengan menggunakan kapal atau perahu wisata. Jarak tempuh lokasi wisata ini yang tidak begitu jauh dari pusat kotasehingga mempunyai nilai tersendiri bagi para wisatawan maupun pengelola wisata itu sendiri.

Wisata Pulau Senoa ini ditetapkan sebagai pulau perbatasan yang terletak di Laut Cina Selatan. Yang dimana Kabupaten Natuna itu sendiri berbatasan langsung dengan Negara-Negara tetangga yang ada di Indonesia seperti Negara

Malaysia Timur (Kalimantan Utara), Vietnam Dan Kamboja. Kabupaten Natuna juga merupakan titik jalur pelayaran internasional yang menghubungkan dari atau ke Hongkong, Taiwan, Jepang, Korea Selatan dan Negara lainnya.⁴

Dikarenakan Lokasi Kabupaten Natuna ini merupakan wilayah yang sangat strategis yang berbatasan dengan Negara-Negara tetangga yang ada di Indonesia, tentunya ini merupakan nilai lebih bagi pengunjung maupun pengelola Wisata Pulau Senoa itu sendiri. Ini merupakan modal awal yang besar bagi Pemerintah Kabupaten Natuna Untuk Mengembangkan wisata Kabupaten Natuna khususnya Wisata Pulau Senoa.

Pesona pantai dengan pasirnya yang putih dan air lautnya yang jernih serta terumbu karang yang masih asri menambah nilai pesona alam pulau ini. Dan perairan di sekitar pulau Senoa ini merupakan lokasi yang ideal untuk dijadikan lokasi *diving*, *snorkeling* untuk menikmati pemandangan bawah laut yang masih terjaga keasriannya, bahkan wisata laut lainnya untuk para wisatawan lokal maupun luar daerah, dikarenakan tatanan terumbu karang dan biota laut yang hidup dan masih terjaga. Serta batu-batu cadas yang begitu besar menjadi nilai tambah akan daya tarik Pulau Senoa ini.⁵ Dapat dilihat seperti pada gambar 1.2 di bawah ini:

⁴<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/04/100000869/kabupaten-natuna-jalur-pelayaran-internasional?page=all> diakses pada 6 Juni 2021, Pukul 15:20

⁵<https://www.tempatwisata.pro/wisata/Pulau-Senoa> Diakses Pada 3 Februari 2021, Pukul 14:32

Gambar 1.2
Wisata Pulau Senoa Kabupaten Natuna



Sumber:kumparan.com

Wisata Pulau Senoa juga merupakan lokasi konservasi penyu. Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Natuna No. 378 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tentang rencana zonasi kawasan strategi Nasional tertentu Pulau Senoa di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2038 Pasal 7 Ayat 2 Yang dimana bertujuan sebagai pengelolaan kawasan konservasi dan upaya untuk menyelamatkan populasi Penyu dari kepunahan, serta

menarik minat para wisatawan luar daerah maupun lokal untuk datang ke Wisata Pulau Senoa.⁶

Sejalan dengan Program Kegiatan yang telah di buat oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kaupaten Natuna, di Pulau Wisata Senoa ini juga di adakan Event festival yang merupakan agenda rutin tahunan yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), yang bekerjasama dengan Karang Taruna Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur.⁷Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 16 yaitu kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat. ⁸Pulau ini juga banyak dikunjungi pada saat hari libur oleh wisatawan lokal maupun dari luar daerah, baik itu untuk menikmati mandi air laut ditepian pantai atau melakukan kegiatan wisata bahari lainnya.

Berbagai upaya dalam mempromosi maupun informasi tentang pariwisata Pulau Senoa telah dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 tentang rencana induk pengembangan pariwisata daerah Kabupaten Natuna nomor 5 pasal 33, Pemerintah telah membangun Pusat Informasi dan Promosi Pariwisata yang merupakan pusat pelayanan informasi dan promosi di bidang pariwisata dan juga informasi maupun promosi Wisata Pulau Senoa juga telah dilakukan seperti promosi di media Internet, koran dan Media

⁶Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tentang rencana zonasi kawasan srtategi Nasional tertentu Pulau Senoa di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2038

⁷https://rri.co.id/humaniora/wisata/542324/festival-pulau-senua-sukses-dilaksanakan-di-natuna?utm_source=news_recommendation&utm_medium=internal_link&utm_campaign=Genera1%20Campaign Diakses Pada 4 Februari 2021, Pukul 13:30

⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Natuna

Sosial lainnya. Namun hingga saat ini upaya yang dilakukan masih belum begitu maksimal, dilihat dari jumlah para wisatawan yang datang ke Wisata Pulau Senoa.

Dapat dilihat pada tabel 1.3 dibawah ini:

Tabel 1.3
Jumlah Kunjungan Wisatawan di Wisata Pulau Senoa

No	Tahun	Domestik	Mancanegara	Jumlah
1	2017	18.615	538	19.153
2	2018	22.615	254	22.930
3	2019	30.500	166	30.666
4	2020	20.712	30	20.751

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna Tahun 2020

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah kunjungan wisatawan setiap tahunnya masih mengalami turun naiknya jumlah kunjungan wisatawan lokal maupun dari luar Negeri, sehingga Pemerintah Kabupaten Natuna perlu melakukan upaya peningkatan di bidang promosi pariwisata agar minat para masyarakat dalam Negeri maupun dari luar Negeri lebih tertarik untuk berkunjung ke Wisata Pulau Senoa.

Pemerintah telah berupaya dalam mengembangkan wisata pulau senoa ini Sesuai dengan Peraturan Daerah pasal 29 tentang transportasi wisata yaitu dengan menyediakan fasilitas yang mendukung seperti alat transportasi berupa perahu wisata yang di khususkan untuk para wisatawan yang ingin berkunjung ke wisata pulau senoa dan pengadaan dermaga apung, tentunya hal ini sangat penting dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Natuna khususnya di Wisata Pulau Senoa.⁹

⁹ Ibid

Berbagai fasilitas umum juga telah di bangun oleh pemerintah untuk para wisatawan yang ingin berkunjung Wisata Pulau Senoa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 pasal 36 seperti diadakan pengadaan toilet, pencahayaan dengan tenaga surya sertamushola atau tempat beribadah untuk para wisatawan.¹⁰

Namun saat ini fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah tidak terawat sebagaimana mestinya bahkan sudah rusak dan tidak dapat digunakan kembali, seperti toilet yang sudah tidak dapat digunakan, lalu pencahayaan dengan tenaga surya yang di sediakan oleh Pemerintah sudah rusak dan berkarat, serta transportasi laut seperti perahu wisata yang seharusnya dikhususkan untuk para wisatawan sudah rusak dan tidak terawat, serta tidak bisa beroperasi lagi.¹¹

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti sangat tertarik untuk mengetahui dan melakukan evaluasi bagaimana proses dan tugas-tugas pemerintah khususnya di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna dalam pengembangan objek wisata di Pulau Senoa Kabupaten Natuna, berdasarkan fenomena-fenomena dan kebijakan terkait masalah pariwisata di Wisata Pulau Senoa. Dan juga peneliti ingin ini mengungkap faktor-faktor apa saja yang menjadi masalah dalam menjalankan Program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata di Kabupaten Natuna.

¹⁰ Ibid

¹¹ Berdasarkan Observasi Awal Penulis, Pada 15 Januari 2021, Pukul 10:30

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diperoleh beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Program yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata di Kabupaten Natuna?"
2. Apa saja faktor-faktor penghambat program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata di Kabupaten Natuna?"

1.3 Batasan Penelitian

Untuk memperjelas dan membatasi ruang lingkup penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan hasil uraian yang sistematis serta tidak terjadinya kekaburan tujuan penelitian maka penulis membatasi penelitian ini hanya membahas tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata di Kabupaten Natuna.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata di Kabupaten Natuna

2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menghambat tugas dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata di Kabupaten Natuna

b. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sisi, yaitu:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ilmu pemerintahan khususnya berkaitan dengan pengembangan kepariwisataan dan sebagai tambahan Khasanah perpustakaan serta bahan masukan bagi peneliti lebih lanjut dengan topik yang sama.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna khususnya merencanakan strategi yang tepat sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dan memprioritaskan pengembangan kepariwisataan. Serta bagi masyarakat luar daerah hasil penelitian ini agar dapat dijadikan motivasi bersama-sama dengan pemerintah lebih meningkatkan pengembangan obek wisata di masing-masing daerah.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Konsep Teori

2.2.1 Ilmu Pemerintahan

Hadirnya ilmu pemerintahan sebagai bagian penting dalam menelaraskan suatu keadaan yang kacau balau tersebut dengan berpedoman pada moral agama yang dimiliki (apapun agamanya yang dikembangkan) sejauhmana memberikan solusi pada persoalan tersebut.¹² Menurut U. Rosenthal dalam Inu Kencana ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukkan cara kerja ke dalam dan ke luar struktur dan proses pemerintahan umum.¹³

Musanef dalam Nia Karniawati mendefinisikan Ilmu Pemerintahan Sebagai Suatu ilmu yang dapat menguasai, memimpin, serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam dan berhubungan antar dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu. Maka dapat disimpulkan bahwa objek dari Ilmu Pemerintahan itu sendiri adalah kepemimpinan dalam pemerintahan.¹⁴

¹²Petrus Polyando, *Menelusuri Kedudukannya Ilmu Pemerintahan*, Vol 3 No.1, Oktober 2016, Hal. 45

¹³Syafiie, Inu Kencana, Op.cit, Hal. 9

¹⁴Nia Karniawati, *Hakekat Ilmu Pemerintahan (Kajiam Secara Filsafat)*, Vol. 1 No. 2, Oktober 2015, Hal. 209

Tujuan ilmu pemerintahan adalah bagi kaum generasi muda yang mempelajarinya yaitu memberikan kontribusi pada mereka bekal yang cukup dengan harapan agar mereka kelak tidak menjadi politisi tetapi kaum generasi muda yang dapat mengemban tugas untuk melayani.¹⁵

Van Poelje mengemukakan kajian atau pokok pembahasan ilmu pemerintahan hanya pada bidang eksekutif saja dan hanya pada bagian umum yang penting saja. Atau ilmu pemerintahan tersebut lebih kepada unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antar dinas dan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas tersebut. Dirincikan dalam beberapa aspek, yaitu:¹⁶

1. Organisasi yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai kesatuan.
2. Kemudian hubungan antara alat kelengkapan satu sama lain.
3. Menyelidiki secara sistematis persoalan sekitar sentralisasi dan desentralisasi.
4. Koordinasi.
5. Kontrol kedalam dan keluar.
6. Hubungan antara pemerintahan dan yang diperintah; (mengatur sedemikian rupa sehingga menghindari timbulnya atau meruncingnya pertentangan-pertentangan, disamping itu

¹⁵ Petrus Polyando, Op.cit, Hal. 48

¹⁶ Poeltje, Van. 1953. *Pengantar Umum Ilmu Pemerintahan*. tjetakan kedua dibahasaindonesia oleh B.Mang Reng Say,N.V. Soeroengan petjenongan 58. Yayasan Karya Darma,IIP, Djakarta Hal. 17-18

mengusahakan supaya sedapat-dapatnya terjamin keserasian dan daya tindak yang tinggi dari pemerintah).

Ilmu pemerintahan juga mempersoalkan secara luas dan mendalam mengenai unsur manusia dalam pemerintahan, yaitu:

1. Kerjasama orang-orang dari dunia perusahaan bebas dalam jabatan-jabatan kehormatan dan perihal bekerjanya dan Organisasi Dinas penguasa sipil.
2. Pembentukan, Pendidikan, Peraturan Dinas dan Gaji.
3. Jaminan-jaminan bagi suatu Pemerintahan yang serasi, terutama bagi mereka yang merasa lebih diperlakukan tidak adil diluar hak untuk mengadukan.¹⁷

Dapat disimpulkan bahwa bidang penyelidikan atau pokok bahasan Ilmu pemerintahan lebih fokus kepada eksekutif saja dengan spesifik pada dinas umum .

Pemerintahan adalah proses “mengarahkan“ pemimpin-pemimpin politik untuk bertindak sebagai pengemudi“. Definisi Plato menempatkan peransentral pemimpin dalam menjalankan roda pemerintahan. Pemimpin politik adapengemudi dan penunjuk aran bagi masyarakatnya.¹⁸ Menurut Apter pemerintah adalah sekumpulankhusus dari individu-individu yang telah menetapkan tanggungjawab untuk mempertahankan dan/atau mengadaptasi sistem

¹⁷ Ibid, Hal 18

¹⁸ Haboddin, Muhtar. 2015. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. UB Press, Malang. Hal. 2

di mana mereka menjadibagiannya. Menjalankan tanggungjawab dengan membuat pilihan-pilihan yang mengikat para anggotanya.¹⁹

Sementara itu menurut S. Pamuji Perintah adalah suatu perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu. Pemerintahan adalah kekuasaan memerintah suatu negara atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu negara seperti kabinet merupakan suatu pemerintahan. Pemerintahan adalah perbuatan atau cara memerintah.²⁰

2.2.2 Pemerintahan

Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni.²¹ Pemerintahan berasal dari kata perintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu ada dua yang terkandung, kedua belah pihak tersebut memiliki saling berhubungan antara pihak yang memerintah, memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.²² Menurut Ndraha, fungsi pemerintahan dibagi menjadi 2 (dua) fungsi²³, yaitu:

1. Pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (*service*), sebagai *provider* jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan sipil termasuk layanan birokrasi.

¹⁹ Ibid Hal. 2

²⁰ Ibid Hal. 3

²¹ Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. (cetakan ke-1). PT. Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 8

²² Ibid.

²³ Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, jilid 1 dan 2. Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 85

2. Pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (*empowerment*), Sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan.

Sangat luas dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintah, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggung jawab yang sangat besar. Untuk mengemban tugas tersebut, diperlukannya sumberdaya, dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat yang didukung oleh aparat yang memiliki perilaku sesuai dengan nilai norma yang berlaku didalam masyarakat dan pemerintahan. Tentunya hal ini perlu di lakukan oleh pemerintah, mengingat pada era yang akan datang perubahan yang terjadi didalam masyarakat akan semakin menambah pengetahuan masyarakat untuk mencermati segala aktivitas pemerintahan dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintahan juga di artikan sebagai sebuah organisasi atau lembaga yang diberikan legitimasi atau keabsahan oleh rakyat untuk menyelenggarakan atau menjalankan kekuasaan (tugas-tugas) negara pada suatu negara dan dilengkapi dengan alat-alat kelengkapan negara sebagai sarana pendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan.²⁴

Menurut Taliziduhu Ndraha dalam Rayunir Rauf, Pemerintahan adalah organ berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melau

²⁴ Rauf, Rahyunir. 2018. *Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. (cetakan ke-1). Zanafa Publishing, Pekanbaru Riau. Hal. 6

lembaga pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan ketentuan (harapan) yang diperintah dan pemerintahan adalah sebuah sistem multi proses yang bertujuan untuk memenuhi dan melindungi berbagai kebutuhan, serta tuntutan yang diperintah akan jasa public dan juga proses layanan sipil.²⁵

Robert Mac Iver dalam Syafiee berpendapat bahwa pemerintah sebagai suatu organisasi dari orang yang mempunyai kekuasaan, sebagaimana manusia itu bisa diperintah. Maka, bagi Mac Iver Ilmu Pemerintahan adalah sebuah ilmu tentang bagaimana manusia itu sapat diperintah (*a science of how man are governed*).²⁶ Sementara itu menurut David Apter Pemerintah adalah satuan komponen yang paling umum yang mempunyai tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang melingkupinya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.²⁷

2.2.3 Pemerintah Daerah

Pemerintahan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pemerintahan Nasional, sehingga pemerintahan daerah merupakan sub sistem dari pemerintahan nasional.²⁸ Pemerintah daerah merupakan satuan-satuan organisasi pemerintah organisasi

²⁵ Ibid. Hal. 10

²⁶ Inu Kencana Syafiee.2018. *Ilmu Pemerintahan dan Al Quran*. Jakarta: Bumi Aksara halaman 29

²⁷ Inu Kencana Syafiee.2010. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Refika Aditama halaman 11

²⁸ Ibid. Hal. 280

pemerintah yang mempunyai kewenang untuk menyelenggarakan setiap kepentingan setempat dari kelompok yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh suatu daerah.²⁹Prinsip Otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya.Yang dimana arti seluas-luasnya ini mengandung makna bahwa daerah diberikan kewenangan membuat kebijakan daerah, untuk memberikan pelayan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk penigkatan kesejahteraan masyarakat.³⁰

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Pemerintah daerah diberi kewenang untuk mengatur serta mengembangkan daerahnya sendiri.Hal tersebut terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 5, “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat”.³¹ Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana yang dimaksud dalam UUD RI Tahun 1945.³² Sementara itu menurut Undang-Undang Republik Indonesia

²⁹ The Liang Gie.*Pertumbuhan Daerah Pemerintah Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*.Gunung Agung, Jakarta. Hal. 44

³⁰ Sunarno,Siswanto.2009.*Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 8

³¹ Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 2 s

³² Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 pasal 1 ayat 2

Tahun 2014 Nomor 23 Pasal 1 Ayat 2 Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³³ Menurut Harson, pemerintahan daerah memiliki eksistensi yaitu sebagai³⁴:

- a) *Local Self Government* atau pemerintah lokal daerah dalam sistem pemerintah daerah di Indonesia adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonom bagi local self government tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam mengurus rumah tangganya sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri, mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijaksanaannya sendiri. Selain disertai urusan-urusan tertentu oleh pemerintah pusat, dapat juga disertai tugas-tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan (tugas medebewind). Tugas ini adalah untuk turut serta (*made*) melaksanakan peraturan perundang-undangan, bukan hanya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat saja, melainkan juga yang ditentukan oleh

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23 Pasal 1 Ayat 2

³⁴ Sarundajang. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah* cetakan ke 3. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. Hal. 77

pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri tingkat di atasnya.

- b) *Local State Government* atau pemerintah lokal administratif dibentuk karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan semacam ini disebabkan karena sangat luasnya wilayah dan banyaknya urusan pemerintahan. Pejabat-pejabat yang memimpin pemerintah lokal administratif itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat, bekerja menurut aturan-aturan dan kehendak dari pemerintah pusat, berdasarkan hierarki kepegawaian, ditempatkan di wilayah-wilayah administratif yang bersangkutan dibantu oleh pegawai-pegawai yang juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat. Segala pembiayaan pemerintah lokal administratif dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

C.F Strong yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok.³⁵ Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk

³⁵Huda, Ni'matull. 2012. *Hukum Pemerintah Daerah*. Nusamedia: Bandung. hlm 28

mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utamadidalamnya³⁶, yaitu:

1. Pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
2. Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut.
3. Dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD.

2.2.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Okonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, yaitu: proses, output perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekomosi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini dapat dilihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya ada pada perubahan atau perkembangan itu sendiri.³⁷

Peryumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output,

³⁶ Setya Retnami. Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta : Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2001. hlm.8

³⁷ Boediono. Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 4. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. BPFE. Yogyakarta, 1999. hlm.1

yang diukur menggunakan Produksi Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah.³⁸

Pertumbuhan Ekonomi merupakan perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku disuatu negara, seperti penambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan jumlah sekolah, penambahan produksi sektor jasa dan penambahan produksi barang modal. Namun sangat sulit untuk menggambarkan pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu Negara, sehingga ukuran yang selalu digunakan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan Nasional riil yang dicapai.³⁹

Pertumbuhan Ekonomi mencerminkan kegiatan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat bernilai positif dan dapat pula bernilai negatif. Jika pada suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan positif, berarti kegiatan ekonomi pada periode tersebut mengalami peningkatan. Sedangkan jika pada suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan negatif, berarti kegiatan ekonomi pada periode tersebut mengalami penurunan. "Pertumbuhan Ekonomi merupakan masalah ekonomi dalam jangka panjang".⁴⁰

Secara umum, pertumbuhan ekonomi menunjukkan aktivitas perekonomian suatu negara atau daerah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Menurut Sadono

³⁸Raharjo Adisasmita. *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah*, cetakan pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta, 2013, Hal. 4

³⁹ Sukirno, Sadono. 2007. *Makro Ekonomi Modern*. Jakarta .PT. Grafindo Persada. Hal. 423

⁴⁰ Sukirno, Sadono. 2004. *Teori Pengantar Makro Ekonomi*, Edisi Ketiga, Cetakan 15. Jakarta: PT. Grafindo Persada.Hal. 421

pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang di produksi dalam masyarakat bertambah.⁴¹ Pertumbuhan Ekonomi wilayah adalah penambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi.⁴² Sementara itu menurut Dedy Rustiono dalam Robinson Tarigan Pertumbuhan ekonomi daerah adalah Pertumbuhan yang diukur dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan. Laju pertumbuhan PDRB akan memperlihatkan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Penekanan pada ”proses”, karena mengandung unsur dinamis, perubahan atau perkembangan. Oleh karena itu pemahaman indikator pertumbuhan ekonomi biasanya akan dilihat dalam kurun waktu tertentu, misalnya tahunan. Aspek tersebut relevan untuk dianalisa sehingga kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendorong aktivitas perekonomian domestik dapat dinilai efektifitasnya.⁴³

⁴¹Sukirno, Sadono. 2015. *Makro Ekonomi Teori Pengantar* Edisi Ketiga. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal. 9

⁴²Tarigan, Robinson. 2014. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi* Edisi Revisi. PT Bumi Aksara, Jakarta. Hal. 46

⁴³Rustiono, Dedy. 2008. “*Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Jawa Tengah*”, Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang. Hal. 26

2.2.5 Pariwisata

Musanef mendefinisikan Pariwisata sebagian suatu perjalanan yang dilaksanakan untuk sementara waktu, yang dilakukan dari suatu tempat ke tempat yang lain untuk menikmati perjalanan bertamasya dan berekreasi.⁴⁴ Sementara itu menurut Yoeti pariwisata harus memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu:⁴⁵

1. Perjalanan dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain, perjalanan dilakukan diluar tempat kediaman dimana orang biasanya tinggal;
2. Tujuan perjalanan dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang, tanpa mencari nafkah di Negara, Kota atau daerah tempat wisata yang di kunjungi.
3. Uang yang dibelanjakan wisatawan tersebut dibawa dari Negara asalnya, dimana dia bisa tinggal atau berdiam, dan bukan diperoleh kerna hasil usaha selama dalam perjalanan wisata yang dilakukan;
4. Perjalanan dilakukan minimal 24 jam atau lebih.

Faktor- faktor tersebut adalah perjalanan yang dilakukan dari satu tempat ke tempat lainnya, serta perjalan itu harus dikaitkan dengan orang-orang yang melakukan perjalanan wisata semata-mata sebagai pengunjung tempat wisata tersebut.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10 Pasal 1 Ayat 4 Tahun 2009 Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan

⁴⁴Musanef. 1995. *Manajemen Pariwisata di Indonesia*. Gunung Harta, Jakarta. Hal.11

⁴⁵Yoeti. Oka, A. 2008. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata..* Pradaya Pratama , Jakarta. Hal.8

yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.⁴⁶ Sementara itu Menurut nyoman S. Pendit pariwisata terbagi menjadi beberapa jenis⁴⁷, yaitu:

1. Wisata Budaya adalah perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan mengadakan kunjungan atau peninjauan ke tempat lain atau ke luar Negeri, mempelajari keadaan Rakyat, Kebiasaan dan adat istiadat, cara hidup, budaya dan seni di daerah tujuan wisata.
2. Wisata Kesehatan adalah seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan menukar keadaan dan lingkungan tempat sehari-hari dimana ia tinggal demi kepentingan beristirahat secara jasmani maupun rohani dengan mengunjungi tempat peristirahatan seperti mata air panas yang dapat menyembuhkan, ke suatu tempat yang beriklim menyejukan dan sebagainya.
3. Wisata Olahraga adalah perjalanan yang dilakukan dengan tujuan berolahraga, mengikuti atau menyaksikan pesta olahraga ke suatu Negara.
4. Wisata Maritim adalah perjalanan yang banyak dikaitkan dengan kegiatan olahraga air seperti memancing, berlayar,

⁴⁶Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10 Pasal 1 Ayat 4 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

⁴⁷Pendit, S nyoman. 2002. *Ilmu Pariwisata Sebuah Penantar Perdana*. PT. Pradnya Paramita, Jakarta

menyelam dan sebagainya untuk memperoleh suatu kesenangan.

5. Wisata Cagar Alam adalah sebuah perjalanan yang dilakukan ke tempat cagar alam, taman lindung, hutan didaerah pegunungan dan sebagainya yang kelestariannya dilindungi oleh Undang-Undang.
6. Wisata Buru adalah wisata yang dilakukan disuatu daerah atau hutan tempat berburu yang dibentuk oleh pemerintah.
7. Wisata Pertualangandikenal dengan *adventure Tourism*, adalah wisata masuk hutan yang belum pernah dijelajahi dan penuh dengan binatang buas, mendaki, terjun kedalam sungai dan sebagainya.

Pariwisata adalah suatu aktivitas yang kompleks yang dapat dipandang sebagai suatu sistem yang besar, yang mempunyai berbagai komponen seperti ekonomi, ekologi, politik, sosial, budaya dan seterusnya.⁴⁸ Bukan hanya itu, sektor pariwisata juga merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang memiliki peranan berjangka panjang. Dengan adanya pariwisata ini dapat menambahkan manfaat positif bagi pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat yang ikut dalam memanfaatkan peluang usaha di objek wisata. Manfaat yang diperoleh

⁴⁸Sudana ,I Putu. 2013. *Strategi Pengembangan Desa Ekologis*. Analisis Pariwisata Vol.13 No. 1 Th., hal 11

pemerintah seperti sumber penerimaan devisa dan pajak.⁴⁹ Menurut definisi yang lebih luas yang dikemukakan oleh Kodhyat pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain bersifat sementara, dilakukan perorangan atau kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu.⁵⁰

2.2.6 Evaluasi

Evaluasi menurut Wirawan adalah sebagai suatu riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi.⁵¹

Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assesment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai

⁴⁹ Arliman S, Laurensius. 2018. "Peran Investasi Dalam Kebijakan Pembangunan Ekonomi Bidang Pariwisata Di Provinsi Sumatera Barat", Jurnal Ilmu Hukum Laurensius Arliman S Vol. 20, No. 2, Agustus, hal 274

⁵⁰ Primadany, Sefira Ryalita, Mardiyono dan Riyanto. Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata. Jurnal Administrasi Publik (JAP). Vol. 1. No. 4. Hal 136

⁵¹ Wirawan. 2011. *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada. Hal. 7

atau manfaat hasil kebijakan.⁵² Menurut William N. Dunn kriteria evaluasi terbagi menjadi 6 (enam), Yaitu:

a) Efektivitas

Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter.⁵³

b) Efisiensi

Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya perunit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.⁵⁴

c) Kecukupan

William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas

⁵² Duun, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Gajah Mada University. PT. Prasetia Widia Pratama, Yogyakarta. Hal. 608

⁵³ Ibid. Hal. 429

⁵⁴ Ibid. Hal. 430

memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.⁵⁵

d) Perataan

William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan (*equity*) erat hubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.⁵⁶

e) Responsifitas

Responsifitas (*responsiveness*) dalam kebijakan publik berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.⁵⁷

f) Ketepatan

Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substansif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.⁵⁸

James Anderson dalam Rian Nugroho membagi evaluasi kebijakan publik menjadi tiga, yaitu:

⁵⁵ Ibid

⁵⁶ Ibid. Hal. 434

⁵⁷ Ibid. Hal. 437

⁵⁸ Ibid. Hal. 85

1. Evaluasi kebijakan publik yang dipahami sebagai kegiatan fungsional.
2. Evaluasi yang memfokuskan pada bekerjanya kebijakan.
3. Evaluasi kebijakan sistematis yang melihat secara objektif program-program kebijakan yang ditujukan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan sejauh mana tujuan-tujuan yang ada telah dinyatakan dicapai.⁵⁹

Edward A. Suchman dalam Rian Nugroho mengungkapkan bahwa di sisi lain lebih masuk ke sisi praktis dengan mengemukakan enam langkah evaluasi kebijakan, yaitu:

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
2. Analisis terhadap masalah
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan
4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain.
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.⁶⁰

Evaluasi kebijakan secara sederhana diartikan sebagai upaya analisis nilai dari fakta-fakta kebijakan. Jika Monitoring merupakan prosedur analisis untuk menghasilkan informasi objektif tentang sebab

⁵⁹Nugroho, Riant. 2006. *KEBIJAKAN PUBLIK (Untuk Negara-Negara Berkembang)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Hal. 166

⁶⁰Ibid, Hal. 167

dan akibat kebijakan program, maka evaluasi merupakan produksi informasi tentang nilai atau harga keluaran (*output*) kebijakan.⁶¹

Dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan merupakan hasil kebijakan dimana pada kenyataannya mempunyai dari hasil tujuan atau sasaran kebijakan, dimana bagian akhir dari suatu proses kebijakan adalah evaluasi kebijakan.

Evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan.⁶² Proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya. Ada beberapa hal penting yang di perhatikan dalam definisi tersebut, yaitu⁶³:

- a. Bahwa penilaian merupakan fungsi organik karena pelaksanaan fungsi tersebut turut menentukan mati hidupnya suatu organisasi.
- b. Bahwa penilaian itu adalah suatu proses yang berarti bahwa penilaian adalah kegiatan yang terus menerus dilakukan oleh administrasi dan manajemen
- c. Bahwa penilaian menunjukkan jurang pemisah antara hasil pelaksanaan yang sesungguhnya dengan hasil yang seharusnya di capai.

⁶¹ Dunn, William N. *Publik Policy Analysis: An Introduction*. (Engle Wood Ciffs: Practice Hall, Inc), Hal. 339

⁶² Leo Agustino. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta,2006), Hal. 186

⁶³Susarwan Danim, *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*, (Jakarta, Bumi askara, 2000), Hal. 14

Evaluasi bertujuan untuk perbaikan mengandung implikasi diperlukannya langkah berupa penilaian (*judgement*). Dengan kata lain, evaluasi dilakukan dalam rangka menilai tingkat efektifitas dari suatu kebijakan (*Policy effectiveness*). Hasil evaluasi bermanfaat dalam rangka perbaikan terhadap rumusan kebijakan dan/ atau implementasi kebijakan.⁶⁴ Menurut Nugroho Evaluasi bukanlah untuk menyalahkan, melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan dari suatu kebijakan publik. Dan evaluasi bertujuan untuk mencari kekurangan dan menutup kekurangan.⁶⁵

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah sebuah proses penilaian atau penafsiran dari apayang menjadi tujuan rumusan atau implementasi suatu kebijakan tersebut.

Menurut Bridgman dan Davis Pengukuran evaluasi kebijakan publik secara umum mengacu pada 4 (empat) indikator pokok yaitu indikator input, indikator proses, indikator output dan indikator outcomes. Adapun penjelasannya sebagai berikut⁶⁶:

1. Indikator *Input* memfokuskan pada penilaian apakah sumberdaya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator ini dapat

⁶⁴ Mustopadidjaja. 2003. *Perkembangan Penerapan Studi Kebijakan*. LAN, Jakarta. Hal. 153

⁶⁵ Nugroho. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. UPT. Malang, Hal. 184

⁶⁶ Bridgman, J. & Davis G. 2000. *The Australian Policy Handbook*. Allen & Unwin, NSW, Aútralian, Hal. 130

meliputi sumberdaya manusia, uang, atau infrastruktur pendukung lainnya.

2. Indikator proses memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator ini meliputi aspek efektifitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tertentu.
3. Indikator *Outputs* (Hasil) memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Indikator hasil ini misalnya berapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu.
4. Indikator *Outcomes* (Dampak) memfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan.

Menurut Simanjuntak penilaian (evaluasi) adalah bagian dari fungsi manajemen yang penting yaitu evaluasi dan pengawasan.⁶⁷ Evaluasi juga memiliki makna penilaian yang dimana menurut Andrew F. Sikula mendefinisikan bahwa penilaian adalah suatu proses mengestimasi atau menetapkan nilai, penampilan, kualitas atau status dari beberapa obyek, orang atau benda.⁶⁸

⁶⁷ Simanjuntak, Payaman. 2005. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta. Hal. 105

⁶⁸ Malayu, Hasibuan, S.P. 2002. *Managemen Sumber Daya Manusia* (Edisi Revisi 1). Bumi Aksara. Jakarta

Evaluasi merupakan kegiatan pemberian nilai atas sesuatu fenomena yang didalamnya terkandung pertimbangan nilai tertentu.⁶⁹ Kemudian Weiss dalam Joko Widodo mengungkapkan bahwa riset evaluasi bertujuan mengukur dampak dari suatu program yang mengarah pada pencapaian dari serangkaian tujuan yang telah ditetapkan dan sebagai sarana untuk memberikan kontribusi dalam membuat keputusan dan perbaikan program pada masa mendatang.⁷⁰ Jones juga mengartikan evaluasi sebagai suatu aktivitas yang dirancang untuk menilai hasil-hasil kebijakan pemerintah yang mempunyai perbedaan-perbedaan yang sangat penting dalam spesifikasi objeknya, teknik-teknik pengukurannya, dan metode analisisnya.⁷¹

2.2 Ulasan Karya

Penelitian ini sangat membutuhkan penelitian terdahulu yang telah diuji kebenarannya, sebagai acuan untuk melihat perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan, berikut penulis sajikan pada tabel 2.1 sebagai berikut:

⁶⁹Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik*. Bayumedia, Malang. Hal. 11

⁷⁰ Ibid Hal. 114

⁷¹ Ibid Hal. 113-114

Tabel 2.1
Ulasan Karya

No	Judul	Identitas	Fokus Kajian
1	Daya Tarik Wisata Alam di Pulau Senoa Natuna Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna	JOM FISIP VOL.4, No.2, Oktober 2017 Penulis: Mita Purnamasari	Untuk Mengetahui Daya Tarik Wisata Alam yang ada di Pulau Senoa dan Untuk mengetahui upaya Pengembangan Daya Tarik Wisata Alam di Pulau senoa
2	Daya Tarik Objek Wisata Alam Pulau Senoa Provinsi Kepulauan Riau	JURNAL HUTAN LESTARI VOL. 5(1): 52-61, 2017 Penulis: Sakdiah, Dkk	Untuk Mengetahui Nilai Potensi dan Daya Tarik Pulau Senoa Untuk Wisata Alam
3	Pengembangan Potensi Pariwisata Natuna Sebagai Daya Tarik Geowisata di Kepulauan Riau	JURNAL KEPARIWISATAAN DAN HOSPITALITAS VOL. 3, No. 2 November 2019 Penulis: I Wayan Thariqy Kawabiki Pristiwasa, Dkk	Mengkaji Tentang Potensi Wisata Natuna Sebagai Daya Tarik Geowisata
4	Strategi Pelaksanaan Peningkatan Kepariwisataaan di Kabupaten Natuna	JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA VOL. 6, No. 4 (2017)	Untuk Menganalisis dan Mendeskripsikan Strategi Yang di Gunakan Dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Natuna.

	Penulis: Edi Farman	
--	---------------------	--

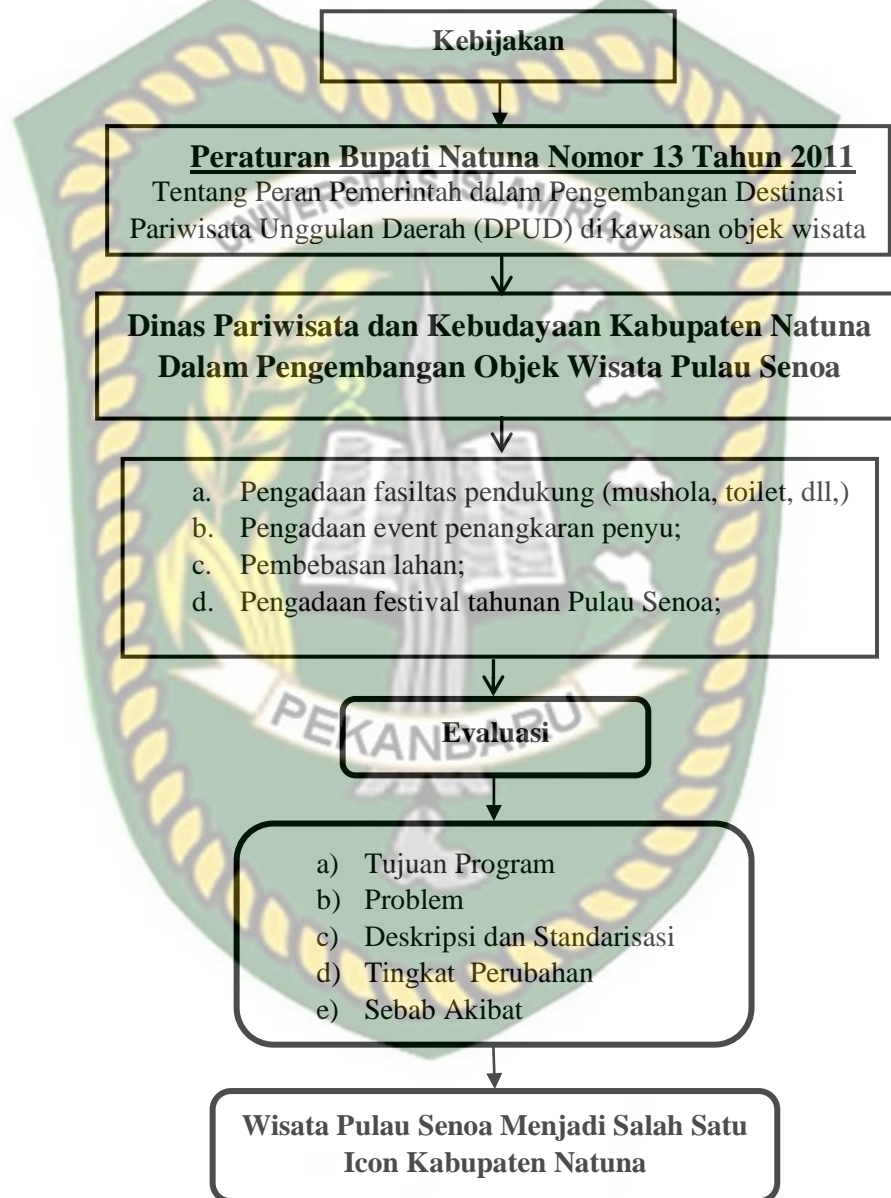
Sumber: Data Olahan Tahun 2021

Dari penelitian terdahulu di atas mempunyai perbedaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis, yang mana penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tentang daya tarik alam geowisata dan potensi alam di wisata pulau senoa serta menganalisis tentang strategi apa yang digunakan dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Natuna. Sedangkan penulis fokus kepada tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengembangan objek wisata pulau senoa di Kabupaten Natuna.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran peneliti bertujuan untuk menggambarkan alur atau konsep dasar dari bagaimana dilakukan sebuah penelitian berdasarkan teori-teori yang telah dikembangkan, sehingga proses pelaksanaan penelitian mudah difahami dan mudah untuk dikembangkan. Berikut kerangka pemikiran penelitian dapat dilihat pada bagan 2.1 dibawah ini:

Bagan 2.1



Sumber :Edward A. Suchman dan Modifikasi Penulis. 2021

2.4 Konsep Operasional

Untuk mempermudah mengartikan dan mempermudah pemahaman di dalam penelitian, maka penulis perlu di operasionalkan dilapangan atau memberi batasan penelitian mengenai konsep dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah merupakan satuan-satuan organisasi pemerintah organisasi pemerintah yang mempunyai kewenang untuk menyelenggarakan setiap kepentingan setempat dari kelompok yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh suatu daerah.
2. Pengembangan adalah suatu proses pembaharuan atau mengembangkan sesuatu objek, baik itu dalam politik, peraturan kebijakan, program dan yang lainnya.
3. Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilaksanakan untuk sementara waktu, yang dilakukan dari suatu tempat ke tempat yang lain untuk menikmati perjalanan bertamasya dan berekreasi.
4. Evaluasi adalah sebuah proses penilaian atau penafsiran dari apa yang menjadi tujuan rumusan atau implementasi suatu kebijakan

2.5 Operasional Variabel

KONSEP	VARIABEL	INDIKATOR	ITEM PENILAIAN
<p>Edward A. Suchman : Evaluasi kebijakan merupakan hasil dimana pada kenyataannya mempunyai dari hasil tujuan atau sasaran kebijakan, dimana bagian akhir dari suatu proses kebijakan adalah evaluasi kebijakan.</p>	<p>Evaluasi Pertumbuhan Ekonomi Pariwisata</p>	<p>a) Tujuan Program b) Problem c) Deskripsi dan Standarisasi d) Tingkat Perubahan e) Sebab Akibat</p>	<p>➤ Midentiengfikasi tujuan program yang di evaluasi ➤ Analisis terhadap masalah ➤ Deskripsi dan Standarisasi Kegiatan ➤ Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi ➤ Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan</p>

			<p>akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain</p> <p>➤ Beberapa Indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.</p>
--	--	--	---

Sumber: Edward A. Suchman dan Modifikasi Penulis, 2021



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Analisis data kualitatif menurut Miles dan Humberman, penelitian Kualitatif akan memunculkan data yang berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka, Data tersebut mungkin telah dikumpulkan dalam berbagai macam cara (Observasi, wawancara, instansi, dokumen, pita rekaman) dan yang biasanya diproses melalui pencatatan, pengetikan, penyutungan, atau alih tulis.⁷²

Kemudian menurut Bogdan dan Biklen dalam Lexy J. Moleong adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola. menemukan apa yang penting dari apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁷³

3.2 Informan Penelitian

⁷²Miles, Mathew B. dan A. Michel Humberman.1992. *Analisis Data Kualitatif*. UI- Press, Jakarta. Hal. 15

⁷³ Moleong, Lexy J. 2011. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. (cetakan ke- 29). PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, Hal. 248.

Informan adalah orang yang menjadi sumber data di penelitian, Untuk mendapatkan data dan informasi dengan wawancara kepada aktor-aktor yang di jadikan informan di dalam penelitian sebagai yang menguasai dan terlibat lebih mendalam. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu:

- a) Kepala Dinas
- b) Sekretaris
- c) Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata
- d) Penggiat Wisata Kabupaten Natuna
- e) Masyarakat yang tinggal di sekitar Objek wisata Pulau Senoa
- f) Pengunjung Objek wisata Pulau Senoa

Informan tersebut diambil serta diperoleh menggunakan teknik Purposive Sampling. Menurut Sunyoto Purposive Sampling bersifat lebih praktis dengan terlebih dahulu menentukan kriteria informan, sehingga membantu peneliti untuk dapat memperoleh informan yang sesuai dengan kriteria tujuan penelitian dan juga relevan dengan dengan masalah penelitian sehingga dapat memberikan data yang menjawab tujuan penelitian secara mendalam.⁷⁴

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna menjadi informan dalam penelitian karena merupakan pimpinan instansi yang memiliki tugas dan kewenangan dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Natuna. Lalu Sekretaris menjadi informan penelitian karena memahami tugas

⁷⁴ Sunyoto, Danang. 2013. *Metode dan Instrumen Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. CAPS. Yogyakarta. Hal. 173

dalam melaksanakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Natuna. Masyarakat yang tinggal di sekitar Objek Wisata Pulau Senoa juga di pilih menjadi informan penelitian karena masyarakat tersebut memahami dan melihat secara langsung bagaimana situasi dan kondisi pengembangan serta juga ikut berperan dalam mengembangkan Wisata Pulau Senoa dalam pengembangan Wisata Pulau Senoa tersebut. Pengunjung Objek Wisata Pulau Senoa dipilih menjadi informan karena merasakan langsung bagaimana kondisi Pariwisata dan seperti apa fasilitas maupun sarana dan prasarana yang di sediakan oleh Pemerintah untuk para wisatawan. dan LSM Kelompok Sadar Wisata Desa Sepempang yang merupakan LSM yang bergerak di bidang pariwisata dan banyak berkontribusi dengan melakukan kegiatan yang menunjang pariwisata Kabupaten Natuna.

3.3 Jenis dan Sumber data

Pengumpulan data melalui wawancara dengan melihat beberapa responden untuk mendapatkan gambaran umum mengenai peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna dalam mengembangkan wisata di Pulau Senoa. Berdasarkan sumber data, pengumpulan data akan menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.

- a. Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti secara langsung dari obyek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan dapat berupa wawancara dan observasi.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dan disatukan oleh studi studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain, biasanya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip arsip resmi.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan melalui wawancara kepada pihak pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengembangan wisata pulau Senoa. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti yaitu:

1) Teknik Observasi

Teknik ini memungkinkan peneliti menarik inferensi (kesimpulan) terkait makna dan sudut pandang narasumber, kejadian, peristiwa atau proses yang diamati. Lewat observasi ini peneliti akan melihat sendiri pemahaman yang tidak terucapkan, bagaimana teori digunakan langsung dan sudut pandang yang mungkin tidak terduga dari wawancara. Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.⁷⁵

2) Teknik Wawancara

⁷⁵ Herdiyansyah, Haris. 2013. *Wawancara, Observasi, dan Focus Group: Sebagai Instrument Pengendalian Data Kualitatif*. (Cetakan ke-1). Rajawali Press, Jakarta, Hal. 131

Wawancara adalah suatu percakapan dengan maksud tertentu.⁷⁶Wawancara dilakukan oleh dua pihak (*interviewew*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Peneliti akan menyampaikan garis besar pertanyaan kepada narasumber terkait dengan peran dari Dinas Pariwisata dalam pengembangan objek wisata pulau Senoa Kabupaten Natuna.

3) Teknik Dokumentasi

Menurut Sukardi⁷⁷, Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada narasumber atau tempat dimana narasumber bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-harinya. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya seseorang. Teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan data yang dimana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya.⁷⁸ Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang program apa saja yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna terekait peran dari Dinas Pariwisata dalam pengembangan objek wisata pulau Senoa Kabupaten Natuna.

⁷⁶ Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*, (cetakan ke-30). PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, Hal. 183

⁷⁷ Sukardi. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. PT. Bumi Aksara, Jakarta. Hal. 81.

⁷⁸ Arikunto, Suharsimi. 2002. *Metodologi Penelitian*. PT. Rineka Cipta, Jakarta. Hal. 158

3.5 Teknik Analisis Data

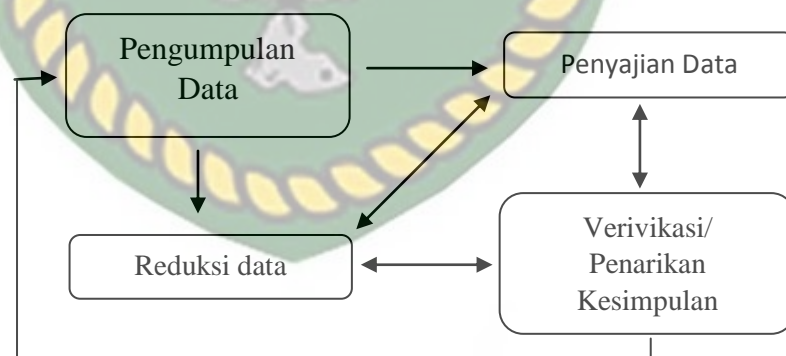
Menurut Miles dan Humberman analisis terdiri dari 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan⁷⁹, yaitu:

- 1) Reduksi Data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data akan berjalan secara terus menerus selama proyek penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah terlihat pada saat waktu penelitiannya memutuskan kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian di lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.
- 2) Penyajian Data Miles dan Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semua dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih.

⁷⁹Miles, Mathew B. dan A. Michel Humberman, Op. Cit. Hal. 16

- 3) Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran peneliti selama dalam penulisan, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Kesimpulan akhir tidak hanya pada saat proses pengumpulan data saja tetapi perlu diverifikasikan agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Secara skema proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Humberman dapat dilihat pada bagan 3.1 berikut:

Bagan 3.1: Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman



Dalam Penelitian ini peneliti mencocokkan antara realita empiris dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti meneliti beberapa obyek diantaranya di

lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna serta kondisi alamiah di lingkungan pariwisata yang dapat mendukung peneliti dalam mendapatkan data yang valid. Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat deduktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif.

Disini peneliti mencari fakta tentang bagaimana tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam mengembangkan obyek wisata pulau Senoa Kabupaten Natuna dengan interpretasi yang tepat, serta akan mempelajari masalah yang terjadi di lapangan, termasuk didalamnya adalah kegiatan, pandangan, sikap, serta proses berlangsung dalam mengembangkan obyek wisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

3.6 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, khususnya lokasi wisata Pulau Senoa yang terletak di Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur. Alasan peneliti mengambil lokasi wisata tersebut karena cukup dekat dengan Ibu kota Kabupaten. Wisata Pulau Senoa ini juga merupakan lokasi wisata terbaik di Kabupaten Natuna serta lokasi wisata pulau senoa ini juga sering diadakan festival/ perayaan masyarakat setempat. Namun dalam pengembangan dan fasilitas yang di sediakan dan dikelola di wisata pulau senoa tersebut masih memiliki

kekurangan, bahkan tidak bisa digunakan sama sekali. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dilokasi tersebut.

3.7 Jadwal Penelitian

Penelitian akan dilakukan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, dengan perkiraan jadwal sebagai berikut:

Tabel 3.2
Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2021-2022 / Bulan / Minggu															
		Mei				Juni				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan P	■	■	■	■												
2	Seminar UP			■	■												
3	Revisi UP					■	■	■	■								
4	Riset					■	■	■	■								
5	Pengolaan dan Analisa Data									■	■	■	■				
6	BimbinganTesis									■	■	■	■				
7	Perbaikan Bab per Bab													■	■	■	■
8	Ujian Tesis															■	■
9	Perbaikan Tesis															■	■

Sumber: Modifikasi Penulis 2021

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1.1 Kabupaten Natuna

A. Geografi

Kabupaten Natuna merupakan salahsatu Kabupaten yang dibentuk pada era reformasi dan otonomi daerah. Kabupaten Natuna juga merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Riau yang secara resmi terbentuk dengan dasar Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999. Pusat Ibukota Kabupaten Natuna adalah kota Ranai yang terletak di pulau Bunguran besar, sebagai ibukota Kabupaten. Posisi Kabupaten Natuna berada pada paling utara Indonesia, Kabupaten Natuna juga berada di Laut Cina selatan dengan posisi yang cukup strategis baik dari segi bisnis maupun tertahan dan keamanan Negara. Dan juga wilayah kabupaten Natuna terletak pada jalur pelayaran Internasionalseperti Hongkong, Jepang, korea dan Taiwan, bukan hanya itu Kabupaten Natuna juga berbatasan langsung dengan negara tetangga lainnya seperti Singapore, Malaysia, Brunei, Kamboja dan Thailand.

Secara Geografis Kabupaten Natuna terletak pada posisi 1°16' - 7°19' LU dan 105°00' - 110°00' BT. Menurut undang-undang Nomor 33 Tahun 2008 Kabupaten Natuna memiliki luas 264.198,37 km² dimana

sebagian besar terdiri dari perairan yakni seluas 262.197,07 km² dan sisanya daratan yang berbentuk kepulauan seluas 2.001,3 km².

Kabupaten Natuna memiliki 154 pulau, dengan 27 pulau (17,53 %) yang berpenghuni dan 127 pulau tidak berpenghuni (82,47%). Dua pulau terbesar diantaranya adalah Pulau Bunguran, dan Pulau Serasan. Secara administratif Kabupaten Natuna terdiri dari 12 kecamatan yaitu Kecamatan Midai, Bunguran Barat, Bunguran Utara, Pulau Laut, Pulau Tiga, Bunguran Timur, Bunguran Timur Laut, Bunguran Tengah, Bunguran Selatan, Serasan, Subi dan Serasan Timur. Daerah yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten

Natuna adalah sebagai berikut:

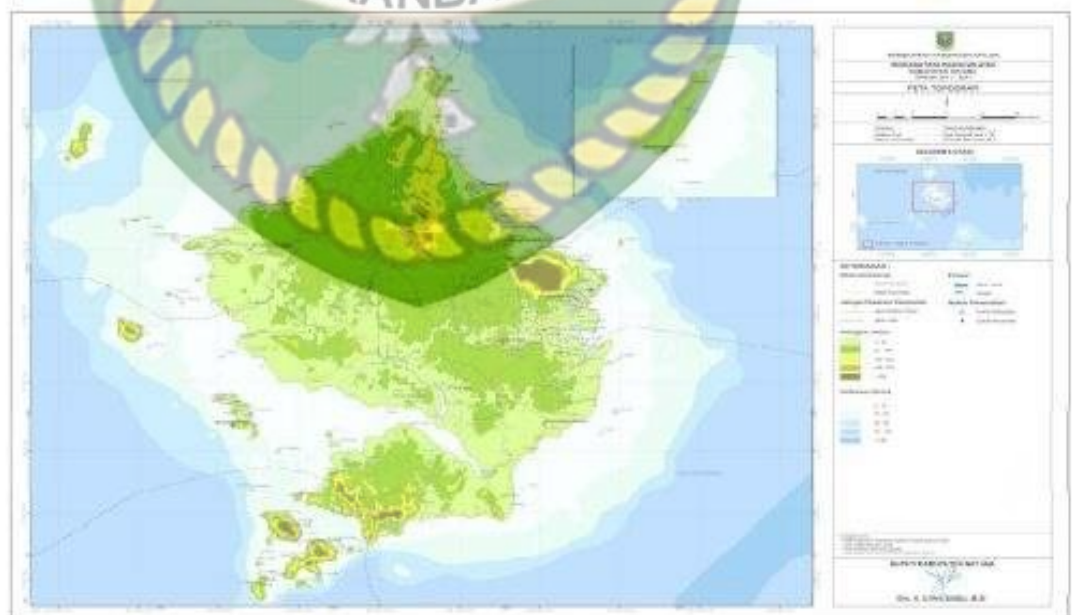
- a. Sebelah Utara : Negara Vietnam dan Kamboja
- b. Sebelah Timur : Malaysia Bagian Timur (Sarawak) dan Kalimantan Barat
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Bintan
- d. Sebelah Barat : Semenanjung Malaysia dan Kabupaten Kepulauan Anambas

B. Topografi

Berdasarkan kondisi fisiknya, Kabupaten Natuna terdiri dari tanah berbukit dan gunung batu. Daratan rendah dan landai pada umumnya terdapat di pinggiran pantai. Berdasarkan kondisi fisiknya, Kabupaten Natuna merupakan tanah berbukit dan bergunung batu. Hampir 10% dari

wilayah Kecamatan Bunguran Timur dan Bunguran Barat merupakan daratan rendah dan landai terutama di pinggiran pantai, 65% berombak dan 25% berbukit sampai bergunung. Ketinggian wilayah antar kecamatan cukup beragam, yaitu berkisar antara 3-959 meter dari permukaan laut dengan kemiringan antara 2-5 meter. Pada umumnya struktur tanah dari tanah podsolik merah kuning dari bantuan yang tanah dasarnya mempunyai bahan granit, dan alluvial serta tanah organosol dan gley humus. Wilayah Kecamatan Serasan sebagian besar terdiri perbukitan dan gunung batu dengan keberadaan tanah datar yang relative terbatas. Di Kecamatan Serasan terdapat beberapa gunung batu yaitu Gunung Kute, Gunung Punjan, Gunung Payak, dan Gunung Pelawan Condong.

Gambar 4.1 Peta Topografi Kabupaten Natuna



Sumber : RTRW Kabupaten Natuna 2011-2031

C. Demografi

Penduduk sebagai objek sekaligus subjek pembangunan merupakan aspek utama yang mempunyai peran penting dalam pembangunan. Oleh karena itu peran serta penduduk dalam pembangunan wilayah mempunyai ikatan yang cukup kuat sesuai dengan tempat tinggalnya. Masalah penduduk di Kabupaten Natuna sama halnya seperti daerah lain di Indonesia. Untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan sulit tercapai. Program kedudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kematian bagi bayi dan anak, perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan yang harus ditingkatkan. Dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Natuna

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2020		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Bunguran Timur	14 188	13 618	27 806
2	Bunguran Barat	4048	3806	7854
3	Bunguran Timur Laut	2770	2602	5372
4	Serasan	2696	2570	5266
5	Bunguran Utara	2349	2176	4525
6	Bunguran Batubi	2023	1859	3882
7	Pulau Tiga	1965	1762	3727

8	Bunguran Tengah	1898	1779	3677
9	Midai	1824	1780	3604
10	Bunguran Selatan	1800	1549	3349
11	Serasan Timur	1653	1549	3202
12	Subi	1537	1527	3064
13	Pulau Laut	1182	1137	2319
14	Pulau Tiga Barat	1070	1039	2109
15	Suak Midai	887	852	1739
	Jumlah	41 890	39 605	81 495

Sumber: BPS Kabupaten Natuna

Dapat dilihat pada tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Natuna sebanyak 81.495 jiwa, terdiri dari 41.890 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 39.605 jiwa berjenis kelamin perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah kelahiran laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan.

4.1.2 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna

a. Visi dan Misi Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna mempunyai visi dan misi sampai target tahun 2020 adalah **"Manjadikan Kabupaten Natuna sebagai pintu gerbang pariwisata di ujung utara Indonesia yang dapat mengangkat harkat dan martabat serta meningkatkan kesejahteraan sosial budaya dan ekonomi masyarakat dalam lingkungan yang berkelanjutan Tahun 2020"**.

Untuk mencapai Visi tersebut diperlukan upaya yang dijabarkan dalam Misi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Spesifikai wilayah yang potensial dan strategis untuk pengembangan pariwisata.
- 2) Spesifikasi stakeholder yang terkait dengan pengembangan pariwisata.
- 3) Spesifikasi potensi atraksi, amenitas dan aksesibilitas sebagai bagian dari produk pariwisata yang akan di kembangkan.
- 4) Spesifikasi kelembagaan, SDM dan jaringan atau para pihak yang trlibat dalam pengembangan pariwisata.
- 5) Spesifikasi kondisi perekonomian Kabupaten Natuna.
- 6) Spesifikasi komponen pasar pariwisata

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Natuna menyatakan bahwa Dinas Pariwisata mempunyai Tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang kepariwisataan dan Kebudayaan. Visi dan Misi seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Natuna mengikuti Visi Kabupaten Natuna, Sejalan dengan Kedudukan, Tugas dan fungsinya Kabupaten Natuna menetapkan Visi, Yaitu:

“MASYARAKAT NATUNA YANG CERDAS DAN MANDIRI DALAM KERANGKA KEIMANAN DAN BUDAYA TEMPATAN”

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Kabupaten Natuna Menetapkan Misi, Yaitu:

1. Mewujudkan perekonomian berbasis sumberdaya alam potensi daerah

2. Memajukan sektor Pendidikan melalui menyediakan sarana dan prasarana
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya masyarakat pesisir, nelayan, dan buruh tani.
4. Membuka keterisolan daerah/ desa melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi laut dan pembukaan jalan.
5. Meningkatkan keamanan dan mewujudkan kesadaran budaya melayu sebagai payung pembangunan daerah.
6. Mewujudkan integritas aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat.

Visi dan misi Kabupaten Natuna sebagaimana diuraikan di atas, menjadi acuan bagi seluruh perencanaan pembangunan daerah di Natuna terkait tugas dan fungsinya.

b. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna

Tugas dan fungsi masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Subbag Umum dan Kepegawaian
 - b. Subbag Keuangan dan Perencanaan
3. Bidang Destinasi Pariwisata
 - a. Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Daya Tarik Wisata
 - b. Seksi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat
4. Bidang Pemasaran Pariwisata

- a. Seksi Promosi Pariwisata
 - b. Seksi Kerjasama Kelembagaan dan Industri Pariwisata
5. Bidang Kebudayaan
- a. Seksi Kesenian, Adat dan Tradisi
 - b. Seksi Sejarah dan Cagar Budaya

Fungsi dari setiap bidang yang ada di Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna. Yaitu:

- 1) Kepala Dinas bertugas sebagai Pemimpin pelaksanaan pekerjaan dan tanggung jawab SKPD sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna.
- 2) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, perlengkapan, urusan keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, penyusunan perencanaan, mengumpulkan, mensistematisasikan dan mengumpulkan program serta evaluasi.
- 3) Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengembangkan objek dan daya tarik wisata, sarana, dan prasarana objek dan daya tarik wisata yang meliputi wisata bahari, wisata alam, wisata buatan, wisata minat khusus, wisata budaya, dan wisata lainnya.
- 4) Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam merencanakan, menyusun dan mengevaluasi perumusan kebijakan pemasaran pariwisata, menciptakan citra pariwisata, koordinasi dengan lembaga pendukung pengembangan

kepariwisataan, promosi yang efektif dan efisien serta tepat sasaran sesuai simentasi pasar, serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia disektor pariwisata sehingga pariwisata memiliki daya saing dan meningkatkan perekonomian masyarakat dunia usaha dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

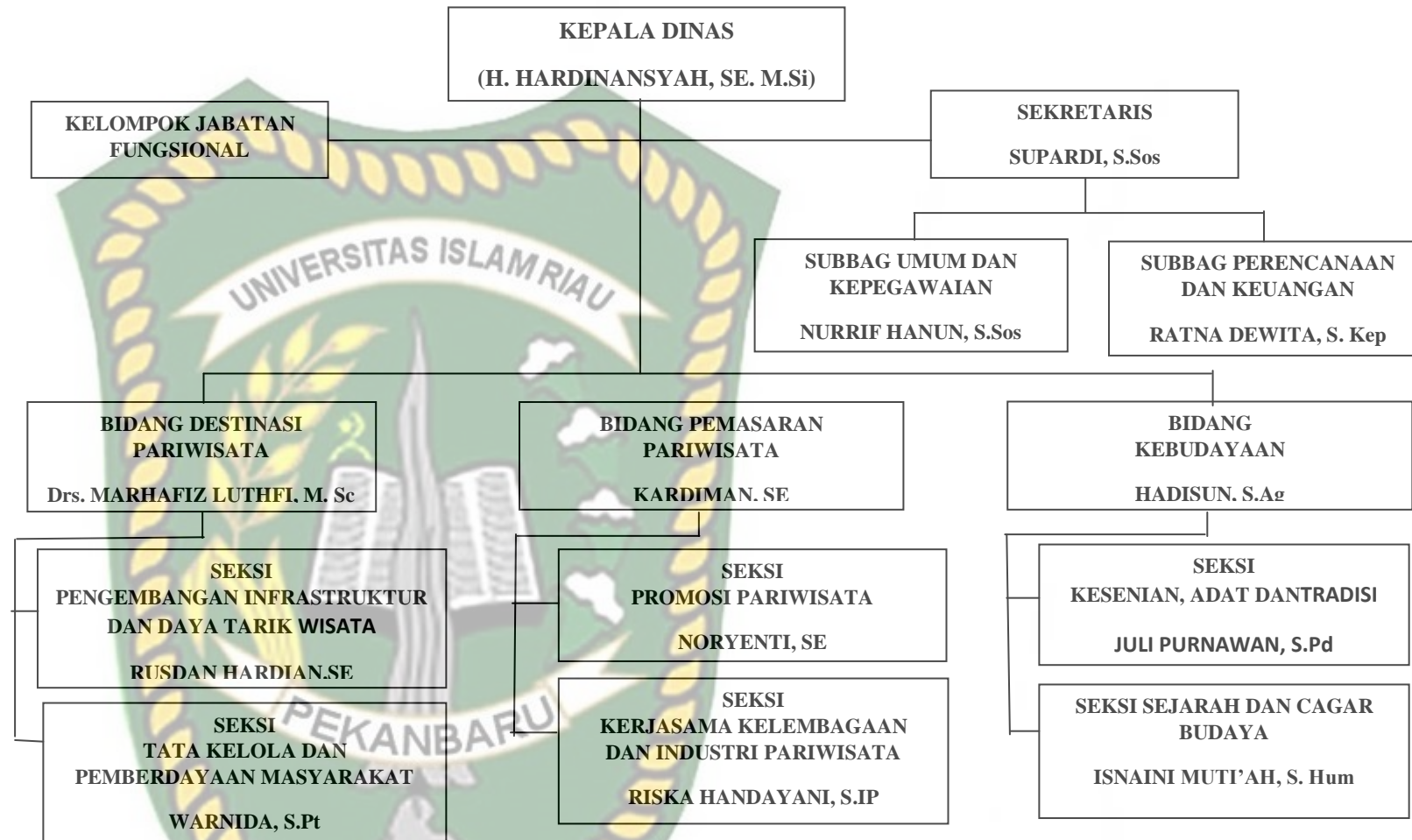
- 5) Bidang Kebudayaan, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitas, koordinasi, serta pembinaan dan pengembangan kebudayaan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Bagan 4.1
Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna



c. Kondisi Sumberdaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna

1. Kondisi pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna menurut tingkat pendidikan:

S2 : 2 Orang

S1 : 19 Orang

Sarjana Muda : 4 Orang

SLTA : 5 Orang

2. Kondisi pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna menurut Kepangkatan

Golongan II : 8 Orang

Golongan III : 17 Orang

Golongan IV : 5 Orang

4.2 PEMBAHASAN

4.2.1 Analisis Program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna.

Evaluasi adalah pemantauan untuk mendapatkan informasi dini mengenai perkembangan pelaksanaan kebijakan pada momentum atau dalam jangka waktu tertentu sehingga dapat diketahui bahwa hal-hal yang perlu di perbaiki baik masalah sistem dan proses pelaksanaan program itu sendiri. Agar perumusan kebijakan lebih tepat, pelaksanaan kebijakan berjalan dengan baik serta tujuan kebijakan dapat dicapai lebih maksimal.

Salah satu yang sering dievaluasi adalah program yang dilaksanakan oleh pemerintah supaya program tersebut tepat sasaran. Salah satu tujuan dari program Pemerintah adalah meningkatkan perekonomian masyarakat seperti yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna. Dalam melaksanakan program yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, peneliti mencoba mengkaji lebih dalam dengan bertanya kepada Bapak H. Hardinansyah, SE. M.Si selaku Kepala Dinas, apa saja yang telah dilakukan mengenai program yang dibuat oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna untuk menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Natuna, terkhususnya program yang di ambil untuk wisata Pulau Senoa.

“Ada beberapa program yang kami lakukan selama pandemi ini untuk menarik wisatawan untuk berwisata ke Kabupaten Natuna, terkhususnya wisata pulau senoa. Yang pertama, melakukan pembinaan sumberdaya manusia bagi pengelola Goesite Pulau Senoa. Kedua, Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengembangan Pariwisata di Geosite Pulau Senoa (Community Base Tourism). Ketiga, menyiapkan aktraksi budaya. Dan yang keempat, Melakukan Promosi potensi Pulau Senoa melalui media elektronik, cetak dan Online “(Hasil wawancara dengan H. Hardinansyah, SE. M.Si Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Pada tanggal 18 November Pukul 10.30)

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah membuat beberapa program untuk menarik minat wisatawan untuk datang ke Kabupaten Natuna, terkhususnya wisata pulau Senoa. *Pertama* melakukan pembinaan sumber daya manusia bagi para Pengelola Geosite Pulau Senoa. Untuk mewujudkan program-program yang telah ditetapkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna tentu dengan melakukan program pembinaan sumber daya manusia yang selama ini telah dilakukan dengan upaya meningkatkan kapasitas dan kemampuan daya saing pada sektor pariwisata. Pembinaan sumber daya manusia dilakukan melalui pembinaan dan pelatihan bagi para pengiat wisata khususnya bagi para Pengelola Geosite Pulau Senoa. Program pembinaan dengan melakukan upaya peningkatan kemampuan pada sektor wisata sebagai dasar yang jelas dan terukur dari suatu program, dimana hasil yang nampak dengan terus bertambah dan berkembang para pengiat wisata yang seiring dengan semakin meningkatnya jumlah kunjungan ke Natuna. Untuk itu, program yang telah ditetapkan oleh Dinas Pariwisata. Harapan melalui pembinaan dan pelatihan ini sebagai upaya terukur dalam mendongkrak kapasitas dan kemampuan bagi para pengiat sektor pariwisata di Natuna khususnya bagi Pengelola Geosite Pulau Senoa. Dimana keterbatasan kemampuan dalam mengelola dan memperkenalkan wisata tentunya lebih kepada peran pengelola agar terus berkembang dan bersaing dengan daerah lain pada sektor sejenis sehingga mampu tetap bertahan dan khususnya menghadapi pandemi ini. Sektor pariwisata

dimasa pandemi ini diuji dalam menunjukkan kemampuannya agar bisa bertahan dari beberapa kebijakan yang tidak berpihak, dimana wisatawan dibatasi dan bahkan tidak bisa berkunjung ke Natuna dengan alasan pembatasan berpergian bagi para wisatawan domestik maupun Internasional. Dengan adanya pembatasan berpergian tentunya berdampak kepada jumlah kunjungan dan berdampak kepada berkurangnya penghasilan bagi para pengiat wisata khususnya Geosite Pulau Senoa. **Kedua** melakukan revitalisasi sarana dan prasarana di Geosite Pulau Senoa yang telah rusak berat akibat dari hantaman ombak ada musim utara yang sering dialami beberapa fasilitas yang tersedia, dimana pelabuhan apung dan ruang tunggu yang dipergunakan sebagai turunnainya penumpang (wisatawan) yang berkunjung ke Geosite Pulau Senoa dalam kondisi rusak berat. Fasilitas pendukung lainnya (WC) dan rumah tunggu yang disediakan sebagai tempat melepas lelah bagi wisatawan yang tidak terawat dengan baik dan tidak rutin dilakukan perbaikan sehingga agak mengganggu kenyamanan bagi para pengunjung yang datang berkunjung ke Geosite Pulau Senoa. **Ketiga**, mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengembangan industri pariwisata di Geosite Pulau Senoa, dimana sebagian besar tanah atau Pulau Senoa masih banyak dimiliki/dikuasai oleh masyarakat sehingga perlu keterlibatan para pemilik tanah untuk mengembangkan potensi wisata di Geosite Pulau Senoa. Ditetapkan Pulau Senoa sebagai Geopark Natuna yang secara konsep dengan pengembangan daerah yang berbasis industri wisata, tentunya

akan berpengaruh besar terhadap pengembangan daerah tersebut, jika masyarakat diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi wisata yang ada. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna telah membuat regulasi yang sesuai dengan kondisinya, yaitu pemilik tanah dapat berperan aktif mengelola Geosite Pulau Natuna dengan bekerjasama dengan para pengiat pariwisata yang telah dibina dan dilatih oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna agar terwujud komunitas wisata sejalan dengan kondisi objek wisata yang akan dikembangkan (*Community Base Tourism*). **Keempat**, menyiapkan kegiatan even lokal yang berbasis kekinian dengan berbagai bentuk atraksi dari kesenian lokal dan kekinian yang memiliki ciri khas daerah yang dapat ditunjukkan kepada para wisatawan Domestik dan Internasional sebagai wujud adanya keberadaan dari kebudayaan tempatan. Dengan adanya even-even resmi yang terjadwal yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, tentu dapat mendorong keinginan para wisatawan Domestik dan Internasional untuk datang berkunjung ke Natuna. **Kelima**, melakukan promosi potensi Geosite Pulau Senoa melalui media elektronik yang meliputi dan terjadwal (skedule) di stasiun TV Nasional seperti TVRI, Metro TV dan CNN Indonesia yang memudahkan wisatawan untuk memperoleh informasi tentang Destinasi Wisata Natuna. Promosi potensi daerah selama ini dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna dengan mencetak brosur, leaflet dan booklet yang secara terus menerus dilakukan mengingat bentuk promosi

seperti ini masih efektif dalam melayani para wisatawan yang datang ke tempat Pusat Informasi Geologi (PIG) yang berlokasi di Jalan Datuk Kaya Wan Moch Benteng. H. Hardinansyah, SE. M.Si Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natunajuga menambahkan bahwa:

“Dalam hal melakukan sertifikasi CHSE untuk sektor pariwisata terhadap para pelaku pengiat wisata yang mendapatkan bantuan pemerintah agar menumbuhkan tingkat keyakinan wisatawan yang datang berkunjung ke Natuna khususnya Geosite Pulau Senoa agar lebih terjamin. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna tentu telah dipertimbangkan, dimana kondisi saat ini kondisi bersih, sehat, aman dan ramah lingkungan adalah hal yang harus dipenuhi bagi setiap pelaku usaha dalam menjual dan memperkenalkan suatu objek/barang yang akan ditawarkan kepada para wisatawan yang datang berkunjung ke suatu Destinasi Wisata khususnya Geosite Pulau Senoa.”(Hasil wawancara dengan Bapak H. Hardinansyah, SE. M.Si Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Pada tanggal 18 November 2021 Pukul 10.30)

Hasil wawancara diatas dapat kita pahami bahwa dengan adanya sertifikasi CHSE yang akan diberlakukan kepada setiap para pelaku pengiat wisata di Natuna akan berdampak kepada tingkat keyakinan bagi para wisatawan yang akan datang berkunjung ke Natuna. Proses persertifikatan ini dapat memberikan kepastian bagi para wisatawan untuk

setiap bentuk usaha yang berbasis kepariwisataan baik Domestik maupun Internasional yang akan diterima selama melakukan perjalanan menuju destinasi wisata di Natuna.

Selain itu juga, para wisatawan juga memperoleh kepastian menerima kemudahan dalam melakukan perjalanan wisata dari paket wisata yang ditawarkan baik melalui media promosi yang dipergunakan oleh pemerintah maupun para pelaku pengiat usaha wisata di Natuna.

Dalam menentukan tingkat keberhasilan pada suatu program dapat diketahui dari adanya seberapa besar target yang ingin dicapai oleh suatu lembaga/instansi tertentu, dimana dengan capaian target yang telah ditetapkan akan berdampak kepada tingkat kepuasan dalam menentukan keputusan berikutnya.

a. Tujuan Program

Yaitu mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi serta untuk mengetahui apa manfaat dan tujuan yang dapat dihasilkan dari program yang dibuat oleh para aktor pembuat program kegiatan. Dalam melaksanakan program yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, peneliti mencoba mengkaji lebih dalam dengan bertanya kepada Bapak Selaku Kepala Dinas, apa saja yang telah dilakukan mengenai program yang dibuat oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata.

“Alasannya kenapa kami mengambil langkah program tersebut karena dengan adanya sertifikasi CHSE dan pelaku usaha mendapat bantuan dari pemerintah serta objek wisata dapat dikembangkan dengan baik maka hal tersebut akan mendorong wisatawan untuk berkunjung ke Natuna.”(Hasil wawancara dengan H. Hardinansyah, SE. M.Si Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Pada tanggal 18 November 2021 Pukul 10.30).

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Supardi S.Sos selaku sekretaris di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna.

“Terkait dengan tujuan program CHSE maka hal ini menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat ingin berkunjung. Karena kebersihan itu sendiri merupakan salah satu hal yang wajib diperhatikan dalam objek pariwisata.” (Hasil wawancara dengan Bapak Supardi, S.Sos selaku sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Pada tanggal 19 November 2021 Pukul 11.15).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna mengambil langkah-langkah dalam membuat program tersebut karena adanya sertifikasi CHSE yang dimana pelaku usaha atau pengelola pariwisata bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah dan juga objek wisata dapat di kembangkan dengan baik dan dapat mendukung program pemerintah dalam mengembangkan wisata di

Kabupaten Natuna dan juga hal tersebut akan mendorong minat Wisatawan dalam maupun luar daerah untuk berkunjung ke Kabupaten Natuna terkhususnya wisata Pulau Senoa. Proses persertifikatan ini dapat memberikan kepastian bagi para wisatawan untuk setiap bentuk usaha yang berbasis kepariwisataan baik Domestik maupun Internasional yang akan diterima selama melakukan perjalanan menuju destinasi wisata di Natuna. SHCE itu sendiri adalah program yang berupa penerapan protokol kesehatan yang berbasis pada *Cleanliness* (Kebersihan), *Health* (Kesehatan), *Safety* (Keamanan), dan *Environment Sustainability* (Kelestarian Lingkungan).

Selain itu juga, para wisatawan juga memperoleh kepastian serta kemudahan dalam melakukan perjalanan wisata dari paket wisata yang ditawarkan baik melalui media promosi yang dipergunakan oleh pemerintah maupun para pelaku pengiat usaha wisata di Natuna.

Dalam menentukan tingkat keberhasilan pada suatu program dapat diketahui dari adanya seberapa besar target yang ingin dicapai oleh suatu lembaga/instansi tertentu, dimana dengan capaian target yang telah ditetapkan akan berdampak kepada tingkat kepuasan dalam menentukan keputusan berikutnya.

b. Problem

Problem atau masalah tentunya adalah sesuatu hal sering muncul dalam melaksanakan program pembangunan, tentunya ini menjadi tugas

pemerintah yang dimana mempunyai tugas untuk menjalankan program serta memajukan daerah khususnya di sektor wisata. Untuk mengkaji serta mengetahui problem atau masalah yang di hadapi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan lebih mendalam, peneliti mewawancarai salah satu narasumber Bapak Kardiman SE. selaku Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna.

“Masalah yang di hadapi Dinas pariwisata dan kebudayaan ini sendiri dalam meningkatkan perekonomian di sektor wisata itu sendiri yang pertama adalah masalah perubahan dalam penganggaran untuk mendukung masalah Covid 19 saat ini, kedua belum optimalnya jadwal penerbangan udara seiring dengan adanya kebijakan pemerintah dalam melakukan PPKM, ketiga masalah kondisi cuaca yang tidak bersahabat dan juga belum tersedianya aksesibilitas yang secara rutin melakukan perjalanan ke Geosite Pulau Senoa.”(Hasil wawancara dengan Bapak Kardiman SE. selaku Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Pada tanggal 19 November 2021 Pukul 09.30).

Untuk menggali lebih dalam mengenai masalah yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna dalam menjalankan program-program untuk meningkatkan perekonomian di sektor wisata. penelitian mencoba untuk menggali lebih dalam dengan bertanya kepada salah seorang masyarakat yang tinggal di lokasi objek wisata pulau Senoa.

“Sebenue dekat Natuna ni, benyuek tembat wisata yang dapat dikembangkan dan punye potensi yang menjanjikan be di olah dengan baik dan terarah lah pemeqindah atau masyarakat ndok suqang, tokoh Wisata Batu Sindu, Wisata Batu Kasah, Pulau Kambing, Setanau dan masih benyuek agik. Natuna ni kan di kelileng lah pantai atau laut, pastilah ade benyuek wisata laut wisata yang lawa dapat di kembangkan.”

“Sebenarnya di Natuna ini ada banyak sekali lokasi objek wisata yang bisa di kembangkan dan mempunyai potensi yang sangat menjanjikan jika kelola dengan baik dan terarah oleh pemerintah maupun oknum masyarakat itu sendiri, Seperti Wisata Batu Sindu, Wisata Batu Kasah, Pulau Kambing, Setanau, dan masih banyak lagi. Dikarenakan juga Natuna ini sendiri di kelilingi oleh pantai maupun laut, tentunya ada banyak wisata laut atau wisata pantai yang bagus dan bisa di kembangkan.”(Hasil wawancara dengan Bapak Junaidi sekalu warga yang tinggal di sekitar lokasi Objek Wisata, Pada tanggal 19 November 2021 Pukul 14.20).

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa Kabupaten Natuna itu sendiri merupakan lokasi yang kaya akan keindahan alamnya dan sangat berpotensi untuk dikembangkan dan dikelola. Bapak Junaidi juga menambahkan:

“Undok masalah transportasi wisata pulau senue biasew e wisatawan yang nak pegi detang gi sinun catar mutur nelayan yang

tinggel dekat sekitar pelabuhan sepembang, biaya ndok biase e undok pegi belek tige ratus sampai empat ratus ribu. soal ye kapal khusus undok wisatawan yang nak gi senue dan diberikkan oleh pemerintahlah lame usak. Lah ndok cuaxe tetendu biase e kami sebut musim utare, sehingga ndek isek jelien nak gi pulau senue.”

“Untuk masalah transportasi wisata pulau senoa itu sendiri biasanya wisatawan yang ingin berkunjung ke pulau senoa mencarter kapal nelayan yang tinggal di sekitaran pelabuhan desa sepembang, dengan biaya untuk pulang perginnya biasanya di kenakan tarif tiga ratus sampai empat ratus ribu. hal ini dikarenakan kapal yang di khususkan untuk wisatan yang ingin berkunjung ke wisata senoa dan di berikan oleh pemerintah mesinnya telah rusak. Dan juga pada cuaca pada cuaca tertentu biasanya kami sebut Musim Utara, sehingga tidak ada akses kapal untuk menuju ke Wisata Pulau Senoa.”(Hasil wawancara dengan Bapak Junaidi sekalu warga yang tinggal di sekitar lokasi Objek Wisata, Pada tanggal 19 November 2021 Pukul 14.20).

Dapat disimpulkan bahwa hambatan yang di hadapi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna dalam meningkatkan Perekonomian di sektor wisata, yaitu:

- 1) Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna adalah dengan adanya perubahan dalam penganggaran (*refocusing anggaran*) dalam mendukung program

Pemerintah Pusat dan Daerah untuk penyelesaian Covid 19 yang belum jelas kapan berakhirnya sehingga berdampak kepada beberapa program dan kegiatan yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna tidak dapat dilakukan.

- 2) Belum optimalnya jadwal penerbangan udara seiring dengan adanya kebijakan pemerintah dalam melakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang normalnya Senin - Sabtu (via Batam Natuna-Natuna Batam). Wisatawan yang datang berkunjung ke Geosite Pulau Senoa adalah tamu kedinasan (Domestik) yang secara tidak langsung melakukan perjalanandinas ke Natuna sambil menikmati suasana alam dan pantai Natuna khususnya Geosite Pulau Senoa yang tidak kalah dengan Destinasi Wisata di Indonesia.
- 3) Kondisi cuaca yang tidak bersahabat, jika kunjungan wisatawan dilakukan pada bulan Agustus - Desember yang dikenal di Natuna dengan sebutan Musim Utara sementara pada jadwal tersebut, banyak para wisatawan memiliki waktu untuk melakukan perjalanan (*traveling*) ke daerah-daerah yang memiliki Destinasi Wisata yang asri yang bernuansa laut dan pantai. Kondisi cuaca dan suasana alam pada musim utara tentunya menjadi hambatan yang mendasar bagi para pengiat wisata, dimana keselamatan pengunjung menjadi prioritas dalam melakukan perjalan ke Geosite Pulau Senoa.
- 4) Belum tersedianya aksesibilitas yang secara rutin melakukan perjalanan ke Geosite Pulau Senoa, dimana armada dan tarif yang

dikenakan atas perjalanan tersebut masih belum stabil, karena tingkat kunjungan yang masih rendah dan armada yang digunakan masih skala kecil dan belum standar. Armada transportasi dan penentuan tarif perjalanan berdasarkan sistem sewa (*carter*) dengan sistem 1 (satu) trip perjalanan yang ditentukan oleh pemilik armada (*speed board*).

Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna dalam hal proses penganggaran yang belum optimal mendukung setiap program yang telah dijalankan dalam hal pembangunan dan perbaikan pelabuhan akibat dari kondisi alam, dimana prioritas penganggaran lebih kepada sektor fisik lainnya seperti jalan, pelabuhan angkutan barang dan jembatan. Belum optimalnya jadwal penerbangan jalur Batam-Natuna dan Natuna-Batam pada kondisi tertentu sangat dipengaruhi kondisi cuaca, dimana armada yang digunakan masih skala kecil (*wings air*) dan lebih didominasi oleh penumpang lokal (masyarakat Natuna). Kondisi cuaca yang tidak bersahabat pada jadwal tertentu (bulan Juli-Desember), dimana musim utara sering menghambat program kerja yang telah ditetapkan dengan melaksanakan even-even resmi daerah yang disejalankan dengan HUT Natuna setiap bulan Oktober. Aksesibilitas yang belum optimal digunakan untuk menuju ke lokasi Geosite Pulau Senoa, dimana armada yang digunakan masih belum standar dan masih tradisional walaupun ada armada cepat (*speedboard*) yang digunakan dengan sistem sewa (*carter*) untuk sampai ke lokasi Geosite Pulau Senoa. Belum ada tarif resmi yang dikeluarkan

lembaga/instansi untuk memudahkan dan menjamin para wisatawan untuk menuju ke Geosite Pulau Senoa.

Adapun armada yang dimiliki oleh para pelaku pengiat wisata berupa armada cepat (*speedboard*) dengan sistem sewa (*carter*) yang dimiliki oleh Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) bantuan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna pada tahun 2014, sampai saat ini terlihat using dan tidak dirawat dengan baik. Dapat dilihat pada gambar 4.3 di bawah ini:

Gambar 4.2
Armada Wisata Menuju ke Pulau Wisata Senoa



Sumber: Hasil Observasi Penulis

Dari gambar di atas dapat di lihat bahwa armada cepat (*speedboard*) dengan sistem sewa (*carter*) yang dimiliki oleh Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) bantuan dari Pemerintah Provinsi

Kepulauan Riau melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna pada tahun 2014, sampai saat ini terlihat using dan tidak dirawat dengan baik. Pemerintah semestinya harus lebih memperhatikan hal tersebut. Karena armada cepat (*speedboard*) akses atau transportasi yang sangat penting untuk para wisatawan dari dalam maupun dari luar daerah yang ingin berkunjung ke wisata puau senoa.

c. Deskripsi dan Standarisasi

Standarisasi tentunya sangat di butuhkan untuk menentukan capaian target suatu program yang ingin di capai, termasuk program yang di tujukan oleh pemerintah kepada masyakat. Sejalan dengan itu peneliti mencoba untuk menggali lebih dalam soal standarisasi atau target capaian program yang di lakukan Oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna.

“Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna dalam menentukan target yang ingin dicapai yang Pertama adalah meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Natuna. Kedua objek wisata terkelola dengan baik dan yang ketiga tersedianya SDM Pariwisata yang berkompeten serta yang keempat, Industri Wisata yang berdaya saing.”(Hasil wawancara dengan H. Hardinansyah, SE. M.Si Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Pada tanggal 18 November 2021 Pukul 10.30)

Hal senada juga di sampaikan oleh Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna:

“Target Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna yang ingin dicapai tentunya bertujuan untuk kepentingan masyarakat serta untuk menciptakan objek wisata yang terkelola dengan baik dan menciptakan sumber daya manusia pariwisata yang berkompeten dan mampu bersaing di era saat ini.” (Hasil wawancara dengan Bapak Kardiman SE. selaku Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Pada tanggal 19 November 2021 Pukul 09.30)

Hasil wawancara diatas dapat kita pahami bahwa target capaian yang ingin diraih oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna dengan upaya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Natuna baik Domestik maupun Internasional. Target ini ditetapkan sebagai bentuk upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kepastian dan kemudahan yang akan diterima oleh wisatawan dengan terlihat pada semakin meningkatnya jumlah kunjungan ke Natuna. Adanya objek wisata yang terkelola dengan baik dengan kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi yang berkompeten dalam bidang kepariwisataan sehingga dapat dipastikan memiliki industri wisata yang berdaya saing dengan daerah lainnya.

Oleh karena itu, dengan tingginya tingkat kunjungan, objek wisata yang terkelola dengan baik yang dikelola oleh Sumber Daya Manusia yang

berkompeten sebagai industri wisata yang berdaya saing tentunya akan berdampak kepada meningkatkan pertumbuhan perekonomian secara umum dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada sektor kepariwisataan di Natuna.

d. Tingkat Perubahan

Peneliti mengidentifikasi hasil pengamatan di lapangan untuk program yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna belum optimal, dimana program yang dilakukan selama ini hanya fokus kepada pembinaan sumber daya manusia bagi para pengelola Geosite Pulau Senoa. Program yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuan daya saing bagi pelaku usaha wisata dengan dasar yang terukur, tetapi hasil pengamatan peneliti hanya dirasakan oleh beberapa pelaku pengiat usaha yang terlibat langsung saja. Tetapi tidak bagi pemilik lahan dan masyarakat sekitarnya sehinggadampak dari adanya Geosite Pulau Senoa tidak begitu dirasakan oleh pemilik lahan dan masyarakat. Hal ini juga ditegaskan bagi para pelaku pengiat usaha pariwisata.

“Bahwa Pemerintah Kabupaten Natuna melalui oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna telah mencanangkan salah satu program yaitu mengajak atau menarik minat masyarakat untuk bersama-sama untuk mengembangkan dan juga memajukan wisata Natuna khususnya Wisata Senoa. Sebagai salah satu aktor LSM yang

bergerak di bidang Pariwisata Natuna, bagaimana menarik minat masyarakat untuk bergerak dalam meningkatkan wisata di Kabupaten Natuna” (Hasil wawancara dengan Bapak Kiki selaku Pegiat Wisata di Kabupaten Natuna Pada tanggal 19 November 2021 Pukul 19.00).

Senada dengan yang di sampaikan oleh arif naen selaku salah pengiat wisata di Kabupaten Natuna yang menyatakan:

“Program yang lah dilakukan same Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna cume sebatas pade pembinaan same pelatihan undok pelaku pengiat wisata, sementara masyarakat same pemilih tanah ndek diberik informasi yang cukup undok pengembangan lokasi Geosite Pulau Senue. Malah pemilih lahanpun jadi perhatian pelaku pengiat usaha, dimane lokasi ye ndok maseh punyi orang pemilik lahan sehingge pengembangannya agak susah karene status lahan.

“Program yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna hanya terbatas pada pembinaan dan pelatihan pada para pelaku pengiat wisata, sementara masyarakat dan pemilik tanah tidak diberikan informasi yang cukup dalam pengembangan lokasi Geosite Pulau Senoa. Masalah kepemilikan lahan juga menjadi perhatian pelaku pengiat usaha, dimana lokasi tersebut masih dikuasai oleh beberapa orang pemilik lahan sehingga pengembangannya agak terkendala oleh status lahan.” (Hasil wawancara dengan Arif naen selaku pengiat wisata di Kabupaten Natuna Pada tanggal 20 November 2021 Pukul 20.30).

Hasil pengamatan lapangan dan wawancara yang telah dilakukan penulis, dapat dipahami bahwa program yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna belum optimal, dimana program yang dilakukan selama ini hanya bagi para pelaku pengiat usaha wisata sementara pemilik lahan dan masyarakat belum terlibat secara langsung dalam pengembangan Wisata khususnya Geosite Pulau Senoa. Masyarakat hanya dilibatkan pada even-even tertentu dalam mendukung program pengembangan suatu lokasi wisata, dengan menjajakan hasil olahan ke lokasi objek wisata.

Hasil pengamatan penulis di lapangan dalam hal program pengembangan objek wisata yang selama ini oleh Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna belum optimal, dimana terlihat beberapa sarana dan prasarana yang ada di lokasi Geosite Pulau Senoa telah rusak berat dan tidak terawat dengan baik sehingga penulis berpendapat bahwa Geosite Pulau Senoa belum dikelola dengan baik dan tidak sehat. Ironi dengan program wisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna dengan telah memberikan sertifikasi CHSE kepada para pelaku wisata. Pembinaan yang dilakukan seharusnya terus menerus dilakukan dengan melakukan pengecekan di lapangan dan melakukan prioritas penganggaran yang cukup terhadap seluruh sarana dan prasarana yang telah dibangun agar

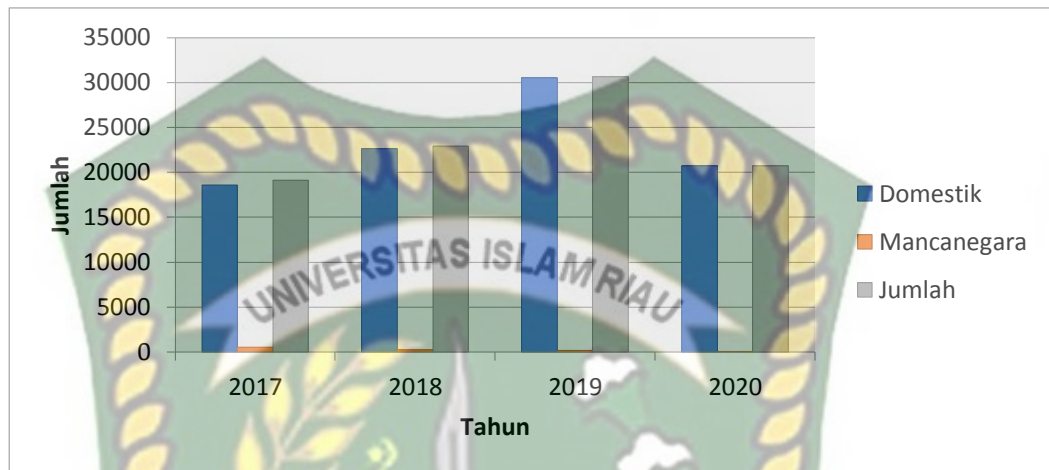
segala sarana dan prasarana yang masih bisa dioptimalkan dapat berfungsi kembali.

Program pembinaan yang telah dilakukan selama ini hanya dirasakan oleh beberapa orang pengiat usaha wisata, dimana pengelolaan objek wisata khususnya Geosite Pulau Senoa di dominasi oleh pengiat usaha wisata yang sering terlibat pada event-event tertentu. Sementara dalam pengembangan suatu objek wisata yang telah ditetapkan sebagai kawasan Geopark seperti Geosite Pulau Senoa tentunya secara terus menerus untuk dilakukan. Event daerah lebih sering dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna agar menarik minat bagi para pemilik lahan dan masyarakat sekitar dapat berperan aktif dalam memberikan dukungan baik secara langsung dan tidak langsung sesuai dengan kemampuan yang dimiliki seperti memberikan peluang usaha wisata dalam hal pemanfaatan lahan melalui sewa, pinjampakai kepada para pengiat usaha wisata.

Dalam menentukan tingkat keberhasilan pada suatu program yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna selama ini dapat terlihat pada tingkat kunjungan wisatawan ke lokasi Geosite Pulau Senoa. Tingkat kunjungan wisata ini juga dipengaruhi oleh tersedianya sarana dan prasarana yang dimiliki. Dapat dilihat pada Grafik 4.1 dibawah ini:

Grafik 4.1

Grafik Tingkat Kunjungan Objek Wisata Pulau Senoa



Sumber: Olahan Dari Penulis, 2020

Tabel 4.1 diatas dapat di lihat bahwa tingkat kunjung wisatawan ke lokasi Objek Wisata Pulau Senoa semakin menurun. Pada tahun 2020 mengalami penurunan kunjungan, dimana pada tahun terakhir ini dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dengan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) termasuk dampaknya bagi para pengelola objek wisata khususnya Geosite Pulau Senoa. Turunnya wisatawan yang datang ke lokasi Geosite Pulau Senoa terlihat pada berbagai penawaran paket wisata. Ini ditegaskan oleh pengiat wisata Kiki firdaus yaitu:

“Turunnya pemesanan paket wisata hanya 4 paket saja sampai bulan September ini dan kondisi normal bisa puluhan paket terjual.” (Hasil wawancara dengan Bapak Kiki selaku Pengiat Wisata di Kabupaten Natuna Pada tanggal 19 November 2021 Pukul 19.00).

Dari data dan hasil wawancara diatas, dapat kita pahami bahwa program yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna tidak optimal, dimana menurun tingkat kunjungan wisatawan seharusnya segera dipahami oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna agar segera melakukan evaluasi program yang telah dilakukan tahun 2020 menjadi dasar untuk melakukan perubahan program atau tindakan program yang lebih tepat sasaran dan mudah untuk dijalankan oleh para pelaku usaha wisata khususnya Geosite Pulau Senoa.

Penulis berpendapat bahwa program yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna belum optimal dan perlu dilakukan evaluasi kembali baik dari pembinaan yang selama ini dilakukan hanya kepada pelaku usaha wisata tetapi juga melakukan koordinasi kepada pemilik lahan dengan memberikan kemudahan dalam mengurus izin usaha dan manajemen pengelolaan objek wisata melalui bimbingan dan pelatihan. Pemberdayaan kepada masyarakat sekitar lokasi objek wisata dengan memberikan peluang usaha dan akses dalam mendukung program pengembangan objek wisata dengan memperkenalkan berbagai macam hasil olahan kuliner dan souvenir yang bisa dijual kepada pengunjung objek wisata Pulau Senoa.

Dengan adanya kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha wisata, pemilik lahan dan masyarakat tentunya akan berdampak kepada tingkat pemahaman yang sama untuk mengembangkan suatu objek wisata akan terwujud dan memberikan nilai ekonomi kepada semua pihak yang terlibat

di dalamnya sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada sektor usaha wisatadan pertumbuhan ekonomi di Natuna pada umumnya.

e. Sebab Akibat

Program pembinaan dan pelatihan kepada para pelaku usaha wisata yang di jalan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natunaselama ini hanya terfokus pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, sementara penguatan kapasitas para pelaku usaha wisata dirasakan belum optimal dimana hanya beberapa pelaku usaha wisata yang merasakan keberadaan hasil pembinaan tersebut.

“Harapan ye masyarakat yang tinggal dekat objek wisata ni di berikan kemudahan same pelatihan lah untuk pelaku usaha wisata. Kalau pemerintah terus lakukan evaluasi same berik program pembinaan tentu timbul ase saling membutuhkan antara pemerintah dengan pelaku usaha wisata e maupun pelaku usaha kuliner khas daerah. Tentu ye secara ndek langsung akan mingkatkan perekonomian di sektor wisata.”

“Harapannya masyarakat yang tinggal di kawasan objek wisata ini di berikan kemudahan dan pelatihan serta pembinaan untuk pelaku usaha wisata. Jika pemerintah terus melakukan evaluasi serta memberikan program pembinaan tentu akan menimbulkan rasa saling ketergantungan antara pemerintah dengan pelaku usaha wisata maupun pelaku usah wisata kuliner khas daerah. yang dimana tentunya secara tidak langsung akan meningkatkan perekonomian di sektor wisata”(Hasil

wawancara dengan Bapak Jinaidi selaku Masyarakat yang tinggal di lokasi objek wisata Kabupaten Natuna pada tanggal 19 November 2021 Pukul 14.20).

Program pembinaan dan pelatihan yang tidak dievaluasi akan berdampak kepada hanya beberapa orang pelaku usaha wisata yang aktif dan program pembinaan yang seharusnya diberikan secara terus menerus dengan memperhatikan kondisi dan keberadaan pelaku usaha wisata sebagai mitra dan peluang bisnis yang menjanjikan (*sustainable*) sehingga menumbuhkan saling ketergantungan antara pemerintah, pelaku usaha wisata, pemilik lahan dan masyarakat sehingga memunculkan suatu keinginan secara bersama-sama dalam melakukan pengembangan suatu objek wisata.

Dampak dengan adanya program yang secara terus menerus dievaluasi dapat menumbuhkan tingkat kepercayaan para pelaku usaha wisata, pemilik lahan dan masyarakat merasa selalu diperhatikan oleh Pemerintah. Program yang dirasakan oleh semua yang terlibat dalam pengembangan usaha wisata khususnya Geosite Pulau Senoa akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi, dimana semua yang terlibat ikut berperan dalam pengembangan suatu objek wisata khususnya Geosite Pulau Senoa.

Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna seharusnya memberikan kepastian dan terukur dalam program yang dilakukan agar pihak yang akan terlibat dapat memahami secara

keseluruhan baik dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasinya jika dalam kondisi tertentu program yang dijalankan mendapat hambatan dan permasalahan. Pengendalian dalam hal mengeluarkan kebijakan dalam bentuk program dengan melibatkan berbagai pihak dapat berdampak positif jika program yang ditawarkan juga memberikan dampak positif pula bagi pihak yang akan terlibat. Komunikasi dan koordinasi kepada pihak yang akan terlibat dalam suatu program yang dijalankan akan mudah untuk dikomunikasikan jika telah terbangun suatu keinginan yang sama dan dilakukan secara bersama-sama.

Dampak positif dari program yang dijalankan dapat menjadi peluang bagi semua pihak pada saat program dijalankan terhadap suatu upaya pengembangan pada lokasi objek wisata khususnya objek wisata Pulau Senoa sehingga kemudahan program yang dijalankan tersebut mudah untuk dikembangkan secara bersama-sama.

4.2.2 Faktor Penghambat

Promosi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna melalui even-even Nasional dan Internasional yang dilakukan selama ini baik secara online (daring) dan offline (luring). Namun pada masa pandemi saat ini digunakan secara online dan tidak begitu optimal yang diharapkan, dimana tingkat kunjungan semakin menurun seiring dengan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk bepergian berdampak pada sektor usaha

Industri Pariwisata. Hal ini senada juga disampaikan oleh beberapa orang pelaku pengiat wisata yang telah terlibat langsung dalam Industri Wisata.

“Menurut saya program dan fasilitas dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan khusus ye pulau snue lom nambak benu. Walau ade gek program tukoh pengadaan pelabuhan apung, perahu undok wisatawan, listrik dengan nenage suryasame fasilitas lainnye. Tapi fasilitas ndok ndek dpat di pakai agik, ade beberape hal yang buet kerusakan ndok dan ndek depat di pakai agik. Salah satu ye tukoh musih utare sehingga pelabuhan jadi rapoh, tapi pemerintah ndek isek perhatiankan, padehal tukoh kite tau pelabuhan ndok fasilitis paling penting yang harus di sediakan undok wisatawan yang nak pegi pulau senue.”

“Menurut saya program atau fasilitas yang di berikan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan khususnya di wisata pulau senoa belum begitu maksimal. Meski sudah ada beberapa program seperti pengadaan pelabuhan apung, perahu yang di khususkan untuk wisatawan, listrik dengan tenaga surya dan fasilitas lainnye. Namun fasilitas tersebut tidak terawat sebagai mestinya dan ada yang sudah rusak dan tidak dapat digunakan lagi. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan kerusakan pada fasilitas tersebut salah satunya pada musim utara sehingga pelabuhan menjadi sangat rapuh, namun pemerintahan tidak begitu memperhatikan bahkan pelabuhan tersebut sangat tidak terawat karna pelabuhan apung itu sendiri merupakan fasilitas paling utama yang harus di sediakan untuk para wisatawan yang ingin berkunjung ke wisata pulau senoa.” (Hasil

wawancara dengan Arif naen selaku Pngiat Wisat di Kabupaten Natuna pada tanggal 20 November 2021 Pukul 20.30).

Hal senada disampaikan oleh Kiki Firdaus untuk dampak dari kondisi pandemi ini kepada para pelaku pengiat wisata khususnya wisata di Pulau Senoa.

“Dampak bagi pengiat wisata khususnya Geosite Pulau Senoa pada masa pandemi, turunnya pemesanan paket wisata hanya empat paket saja sampai bulan November ini dan kondisi normal bisa puluhan paket terjual. Dengan adanya pemberlakuan pembatasan masyarakat dari Pemerintah juga dirasakan oleh pelaku wisata lain seperti hotel dan penginapan, dimana harus berpikir untuk terus beroperasi dan para pengiat wisata harus mencari alternatif objek wisata sejenis karena sarana dan prasarana umum di Geosite Pulau Senoa banyak yang rusak berat.” (Hasil wawancara dengan Bapak Kiki selaku Pngiat Wisat di Kabupaten Natuna Pada tanggal 19 November 2021 Pukul 19.00).

Hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa kondisi fisik sarana dan prasarana yang tersedia di Geosite Pulau Senoa telah rusak parah dan berkarat, dimana perlu untuk dilakukan perbaikan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna.

Untuk lebih jelas kondisi fisik sarana dan prasarana utama berupa pelabuhan apung yang telah mengalami kerusakan yang cukup parah dengan kondisi fisik yang terlihat banyak yang patah dari hantaman ombak

dan kondisi besi yang berkarat (korosi) akibat dari air laut. Dapat dilihat pada gambar 4.1 di bawah ini:

Gambar 4.3
Kondisi Pelabuhan Apung di Pulau Wisata Pulau Senoa



Sumber: Dokumentasi Pribadi Penulis

Pada masa pandemi sekarang ini dengan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh Pemerintah Pusat dan Daerah sangat berdampak kepada turunnya tingkat kunjungan wisatawan, dimana sampai di bulan November 2021 ini yang telah melakukan pemesanan hanya 4 paket wisata, yang biasanya pada kondisi normal sampai pada puluhan paket yang terjual. Pelaku wisata sejenis yang ada di

Natuna sangat mengalami dampak kepada turunnya pendapatan, sementara operasional dan pemeliharaan tetap terus dilakukan demi menjaga kestabilan alat dan mesin yang dipergunakan bahkan pada tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dampak lain yang dirasakan oleh para pelaku wisata, semakin singkat waktu pilihan wisatawan untuk berkunjung pada tempat yang khususnya wisatawan yang berkunjung ke Geosite Pulau Senoa. Geosite Pulau Senoa yang diunggulkan selama ini telah menjadi lokasi alternatif, dimana lokasi dan jarak tempuh yang ditawarkan lebih dominan dipilih oleh wisatawan karena pertimbangan sarana dan prasarana dan kondisi cuaca yang kadang tidak bersahabat bagi para pengunjung. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna berperan selama ini lebih kepada membuat regulasi, membangun sarana dan prasarana umum dan pembinaan bagi para pengiat wisata. Penganggaran adalah hal yang mendasar bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna untuk melakukan suatu perannya, dimana perbaikan sarana dan prasarana ditentukan oleh penganggaran pada suatu objek wisata yang akan ditetapkan melalui beberapa tahapan perencanaan penganggaran dalam Musrenbang Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Alur proses penganggaran yang sedikit panjang tentunya berdampak kepada terlantarnya (*idle*) suatu objek/barang yang tidak berfungsi secara optimal sehingga berdampak kepada berkurangnya keinginan pengunjung untuk datang ke destinasi wisata tersebut dan ketidakmampuan para pengiat

wisata untuk menganggarkan sendiri sarana dan prasarana utama yang tersedia dari biaya yang tidak sedikit biayanya. Kiki juga menambahkan:

“Kami para pengiat wisata berharap peran dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna selain dalam mengoptimalkan pengembangan Geosite Pulau Senoa, diharapkan mampu mengkomunikasikan pemilik tanah di lokasi Geosite Pulau Senoa agar dapat ikut berperan aktif dalam mengembangkan Geosite Pulau Senoa sebagai Destinasi Wisata yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar khususnya Desa Sepempang dengan cara memperkenalkan budaya setempat seperti silat, nyanyian alu dan kuliner yang khas seperti otak-otak, kernas, serta Pizza Natuna yang disebut “tabel mando” dikalangan masyarakat Natuna.”(Hasil wawancara dengan Bapak Kiki selaku Pengiat Wisata di Kabupaten Natuna Pada tanggal 19 November 2021 Pukul 19.00).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna agar lebih berperan aktif dalam meningkatkan perekonomian di sektor wisata dengan memberikan program pelatihan bagi masyarakat tentang pengelolaan lokasi wisata dan pengelolaan sumber daya alam, melalui pengolahan sumber hasil laut serta pelatihan dalam melakukan pemasaran hasil olahan berupa hasil kuliner dari olahan makanan hasil laut khas daerah Kabupaten Natuna yang seharusnya menjadi faktor pendukung program yang

ditawarkan ke palaku wisata dan usaha kepariwisataan. Hasil olahan kuliner masyarakat Natuna dapat dilihat pada gambar 4.2 di bawah ini:

Gambar 4.4
Hasil Olahan Kuliner Masyarakat Natuna



Sumber: *Tempo.com*

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa hasil olahan kuliner akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung yang datang ke lokasi Wisata Pulau Senoa namun tidak dijadikan suatu pertimbangan bagi pelaku usaha wisata, dimana yang seharusnya masyarakat diberikan peluang bisnis dalam menjajakan hasil olahan. Desa Sepempang merupakan daerah terdekatyangmemiliki hasil kuliner berupa hasil olahan ikan tongkol (ikan tuna) yang dapat memberikan kemudahan bagi para pengunjung yang menikmati hasil olahan yang disajikan dengan berbagai macam olahan seperti otak-otak, kernas, kerupuk atom dan tabel mando

(pizza Natuna) yang selama ini cukup dikenal oleh kalangan tamu Domestik dan Internasional.

“Kami masyarakat yang tinggal dekat dengan lokasi objek wisata desa sepempang ini tentu mengharapkan pemerintah lebih memperhatikan tentang masalah tukoh mene nak ngolah hasil kuliner daerah ite ni undok di distribusikan, karena dalam hal ni pemerindah sangat berperan benu, cuntoh e tukoh pengelolaan makanan, pemasaran yew, same memberikan sarana dan prasana undok pengelola kuliner atau distributor kuliner daerah ndok.”

“Kami masyarakat yang tinggal di dekat lokasi objek wisata di desa sepempang ini tentunya sangat mengharapkan pemerintah lebih memperhatikan tentang masalah bagaimana pengolahan hasil kuliner daerah untuk distribusikan, karena pemerintah dalam hal promosi kuliner daerah ini tentunya sangat berperan, contohnya seperti pelatihan pengolahan makanan, pemasaran, serta memberikan sarana dan prasarana bagi pengelola hasil kuliner maupun distributor kuliner daerah itu sendiri.”(Hasil wawancara dengan Bapak Junaidi selaku Masyarakat yang tinggal di lokasi objek wisata Kabupaten Natuna pada tanggal 19 November 2021 Pukul 14.20).

Dapat kita pahami bahwa peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna dalam melakukan upaya perbaikan dan pemeliharaan yang cepat dan tepat sehingga sarana dan prasarana yang menjadi

persoalan utama pada suatu lokasi destinasi wisata khususnya di Geosite Pulau Senoa dapat diselesaikan dan berikan prioritas tertentu dalam proses penganggaran dan pelaksanaan perbaikannya. Selain itu juga peran aktif dari pemilik tanah untuk menjadi pelaku utama dalam mengembangkan Destinasi Wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai Geosite Pulau Senoa agar dapat memberikan dampak perekonomian bagi para pelaku pengiat wisata dan masyarakat setempat dengan menjual hasil produk olahan berbahan dasar ikan tongkol (ikan tuna).

Dengan adanya peran masyarakat dalam suatu program tentunya dapat memberikan efek domino (*multiflier efek*) yang luas, dimana penentuan keputusan yang diambil memang hasil kesepakatan bersama-sama dalam mengembangkan suatu destinasi wisata khususnya Geosite Pulau Senoa. Program yang ditawarkan pemerintah diterima secara baik oleh masyarakat, dapat berdampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat, dimana peran tersebut mampu memberikan nilai positif secara bersama-sama antara pemerintah dengan masyarakat. Nilai positif dari program yang telah diterima oleh masyarakat, dapat berkembang dengan baik, jika suatu destinasi wisata tersebut disadari dapat menumbuhkan keinginan berubah yang menghasilkan dan berhasil guna dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sekitarnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan terkait evaluasi program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sektor wisata yang dilakukan oleh Peneliti. Dapat di simpulkan bahwa, program yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna dalam meningkat pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata belum begitu maksimal, dapat di lihat dari program-program yang di adakan oleh Dinas itu sendiri. Ada sebagian yang tidak begitu di rasakan dan tidak dapat di lihat oleh masyarakat, seperti di lihatpada aspek pengadaan fasilitas dan juga kurangnya informasi-informasi kepada masyarakat terkait pengembangan Kepariwisataaan serta kurangnya peran pemerintah dalam memberikan pelatihan-pelatihan khusus kepada masyarakat seperti pelatihan pengelolaan Sumber Daya Wisata, pengelolaan hasil laut, dan juga pelatihan pengelolaan sumber daya manusia itu sendiri yang dimana program itu sendiri untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkompeten di bidang kepariwisataan dan mampu bersaing di era saat ini. Peran pemerintah dalam menjalankan program untuk berikan kemudahan dan pelatihan serta pembinaan untuk pelaku usaha wisata. Serta melakukan evaluasi secara terus-menerus memberikan program pembinaan tentu akan menimbulkan rasa saling ketergantungan antara pemerintah dengan pelaku

usaha wisata maupun usah kuliner khas daerah. yang dimana tentunya secara tidak langsung akan meningkatkan perekonomian di sektor wisata.

Kabupaten Natuna itu sendiri mempunyai sumber daya alam yang sangat indah dan kaya akan objek wisata yang berkompeten. Namun perlu adanya program-program serta keterlibatan Pemerintah yang diemban oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna itu sendiri dalam meningkatkan objek wisata khususnya objek Wisata Pulau Senoa.

5.2 Saran

Pemerintah Kabupaten Natuna dalam hal ini tentunya harus lebih berperan aktif, serta harus melakukan kerja ekstra untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di sektor pariwisata. Seperti meningkatkan program pelatihan-pelatihan khusus kepada masyarakat seperti pelatihan pengelolaan Sumber Daya Wisata, pengelolaan hasil laut, dan juga pelatihan pengelolaan sumber daya manusia itu sendiri yang dimana program itu sendiri untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkompeten di bidang kepariwisataan.

Pemerintah juga seharusnya lebih memperhatikan permasalahan dari segi sarana dan prasarana, seperti perahu wisata yang telah rusak dan berkarat serta tidak dapat dioperasikan, di akibatkan oleh hantaman obak maupun diakibatkan oleh faktor kurangnya perawatan secara rutin. karena hal tersebut merupakan fasilitas yang harus diutamakan untuk para wisatawan yang ingin berkunjung ke wisata Pulau Senoa. Lalu fasilitas lainnya seperti WC umum

yang juga tidak dapat di gunakan serta tidak adanya mushola dan juga tidak adanya air bersih yang di sediakan untuk para wisatawan yang berkunjung ke wisata pulau senoa. Tentunya hal tersebut sangat perlu di perhatikan oleh pemerintah sebagai sarana dan prasarana yang di butuhkan untuk menarik minat maupun untuk wisatawan yang berkunjung ke wisata pulau senoa.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. RinekaCipta
- A Yoeti, Oka. 2008, *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta, PradayaPratama.
- Bridgman, Peter dan Davis, G. 2000. *The Australian Policy Handbook*. Australian: Allen & Unwin
- Boediono. 1999. *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 4. Teori Pertumbuhan Ekonomi*. BPFE. Yogyakarta,
- Danim, S.(2000). *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Jakarta: BumiAskara
- Duun, William N.2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gajah Mada University, Yogyakarta: PT. PrasetiaWidiaPratama
- Dunn, William N. *Publik Policy Analysis: An Introduction*. (Engle Wood Ciffs: Practice Hall, Inc),
- Haboddin, Muhtar. 2015. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Malang: UB Press.
- Herdiansyah, Haris. 2013. *Wawancara, Observasi, dan Focus Group: Sebagai Instrument Pengendalian Data Kualitatif*. (Cetakan ke-1), Jakarta: Rajawali Press
- Huda, Ni'matull. 2012. *Hukum Pemerintah Daerah*. Bandung: Nusamedia.
- Malayu, Hasibuan, S.P. 2002. *Managemen Sumber Daya Manusia (EdisiRevisi 1)*. Jakarta: BumiAksara.
- Miles, Mathew B. dan A. Michel Humberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI- Press
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. (cetakanke- 29). Bandung: PT. RemajaRosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. (cetakan ke-30) Bandung: PT. RemajaRosdakarya
- Musanef. 1995. *Manajemen Pariwisata di Indonesia*. Jakarta: GunungHarta
- Mustopadidjaja. 2003. *Perkembangan Penerapan Studi Kebijakan*. Jakarta: LAN

- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. jilid 1 dan 2. Jakarta: RinekaCipta
- Nugroho. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UPT
- Nugroho, Riant. 2006. *KEBIJAKAN PUBLIK (Untuk Negara-Negara Berkembang)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Nyoman S. Pendit. 2002. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Pitana, I. Gede dan Gayatri, Putu G. 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: Andi
- Poeltje, Van. 1953. *Pengantar Umum Ilmu Pemerintahan*, tjetakankedua Dibahasa Indonesia oleh B.MangRengSay, N.V. Soeroenganpetjenongan 58 Djakarta: Yayasan Karya Darma, IIP.
- Raharjo, Adisasmita. 2013. *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah*, cetakan pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rauf, Rahyunir. 2018, *Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. (cetakan ke-1). Pekanbaru Riau: Zanafa Publishing.
- Sarundajang. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah* cetakan ke 3. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta
- Siagian, S.P. 2012. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Simanjuntak, Payaman. 2005. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Siswanto, Sunarno. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sukardi. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Sukirno, Sadono. 2004. *Teori Pengantar Makro Ekonomi*, Edisi Ketiga, Cetakan 15. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. 2007. *Makro Ekonomi Modern*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Sunyoto, Danang. 2013. *Metode dan Instrumen Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: CAPS.
- Tarigan, Robinson. 2014. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi Edisi Revisi*. Jakarta: PT Bumi Aksara

- Syafiie, InuKencana. 2010. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Refika Aditama
- Syafiie, InuKencana. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. (cetakan ke-1) Jakarta: PT. RinekaCipta
- Syafiie, InuKencana. 2018. *Ilmu Pemerintahan dan Al-Quran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- The Liang Gie. *Pertumbuhan Daerah Pemerintah Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung.
- Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia
- Wirawan. 2011. *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Jurnal/ Karya Ilmiah:

- Arliman S, Laurensius. 2018. “Peran Investasi Dalam Kebijakan Pembangunan Ekonomi Bidang Pariwisata Di Provinsi Sumatera Barat”, *Jurnal Ilmu Hukum Laurensius Arliman S* Vol. 20, No. 2, Agustus 2018.
- Farman, Edi 2017. *Strategi Pelaksanaan Peningkatan Kepariwisata di Kabupaten Natuna* *JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA* VOL. 6, No. 4 (2017)
- Karniawati, Nia. 2015, *Hakekat Ilmu Pemerintahan (Kajian Secara Filsafat)*. *Cosmogov* VOL.1, No.2: 209, Oktober 2015
- Polyando, Petrus. 2016, *Menelusuri Kedudukannya Ilmu Pemerintahan*. *Jurnal Politikologi* VOL.3, No.1:39-50, Oktober 2016
- Primadany, Sefira Ryalita, Dkk. *Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah (Studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk)*, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* VOL.1 No.4: 135-143
- Primadany, Sefira Ryalita, Mardiyono dan Riyanto. *Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata*. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol. 1. No. 4.
- Prnemasari, Mita. 2017. *Daya Tarik Wisata Alam di Pulau Senoa Natuna Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna*. *JOM FISIP* VOL.4, No.2, Oktober 2017

- Rustiono, Dedy. 2008. “*Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Jawa Tengah*”, Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Sakdiah, Dkk. 2017. *Daya Tarik Objek Wisata Alam Pulau Senoa Provinsi Kepulauan Riau.*, JURNAL HUTAN LESTARI VOL. 5(1): 52-61, 2017
- Sudana, Putu. 2013. *Strategi Pengembangan Desa Ekologis.* Analisis Pariwisata Vol.13 No. 1 Tahun 2013
- Thariqy Kawabiki Pristiwasa, I Wayan. 2019. *Pengembangan Potensi Pariwisata Natuna Sebagai Daya Tarik Geowisata di Kepulauan Riau.* JURNAL KEPARIWISATAAN DAN HOSPITALITAS VOL. 3, No. 2 November 2019

Peraturan Perundang-Undangan:

- Peraturan Bupati Natuna tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nomor 13 Tahun 2011
- Peraturan Daerah Kabupaten Natuna tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2012
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tahun 2018-2038 Tentang rencana zonasi kawasan strategi Nasional tertentu Pulau Senoa di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.
- Undang-Undang Dasar 1945

Internet:

<http://www.disparbud.natunakab.go.id>) diakses 3 Februari 2021

<https://www.tempatwisata.pro/wisata/Pulau-Senoa> diakses 3 Februari 2021

https://rri.co.id/humaniora/wisata/542324/festival-pulau-senua-sukses-dilaksanakandinatuna?utm_source=news_recommendation&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign diakses Pada 4 Februari 2021

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/04/100000869/kabupaten-natuna-jalur-pelayaran-internasional?page=all> diakses pada 4 Februari 2021



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau